PEMECATAN LEGISLATIF TERPILIH DPRD

PROVINSI SULAWESI SELATAN OLEH DPD

PARTAI PDI PERJUANGAN

Optimization Software:
www.balesio.com

PEMECATAN LEGISLATIF TERPILIH DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN OLEH DPD PARTAI PDI PERJUANGAN

TESIS

Disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister

pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

ANRIANI

P4300216302

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2020

Optimization Software:
www.balesio.com

TESIS

PEMECATAN LEGISLATIF TERPILIH DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN OLEH DPD PARTAI PDI PERJUANGAN

Disusun dan diajukan oleh

ANRIANI

Nomor Pokok : P4300216302

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **11 Agustus 2020**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat

Prof. Dr.Muhammad, S.IP., M.Si.	**Dr. Gustiana A. Kambo, S. IP., M.Si.**
Ketua	Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Politik,	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
na,S. IP., M.Si.	**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

ANRIANI. *Pemecatan Calon Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD Partai PDI Perjuangan* (dibimbing oleh Muhammad dan Gustiana A. Kambo).

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis faktor yang memengaruhi pemecatan calon legislatif terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD partai PDI Perjuangan.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif yang memberikan gambaran faktual mengenai faktor pemecatan calon legislatif terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD partai PDI Perjuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor yang memengaruhi pemecatan calon legislatif terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD partai PDI Perjuangan. Pemecatan yang dilakukan DPD partai berawal pada adanya laporan dari sekretariat daerah terkait adanya pelanggaran anggaran dasar rumah tangga (ADRT) partai yang dilakukan oleh Novianus Y.L. Patanduk dengan tidak membayar uang gotong royong (uang saksi) yang dipersyaratkan partai. Selain itu, adanya tudingan permainan suara yang dituduhkan oleh Risfayanti Muis yang berakibat merugikan perolehan suara di internal partai PDI Perjuangan. Pemecatan Novianus menjadi peluang Risfayanti Muis untuk terpilih menjadi anggota legislatif karena mendapatkan suara tertinggi kedua dari total perolehan kursi PDI Perjuangan.

Kata kunci: pemecatan, partai politik, uang saksi

20/7 2020 20/7 2020

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRACT

ANRIANI. *The Dismissal of Elected Legislative Candidate of the DPRD of South Sulawesi Province by Regional Board of Indonesian Democratic Perjuangan Party (PDIP)* (supervised by **Muhammad** and **Gustiana A. Kambo**)

The aim of this study is to examine and analyze the factors affecting the dismissal of the elected legislative candidates of the DPRD of South Sulawesi Province by Regional Board of Indonesian Demicratic Perjuangan Party (PDIP).

This research was a qualitative study providing a factual description of the factors affecting the dismissal of the elected legislative candidates of DPRD of South Sulawesi Province by Regional Board of PDIP.

The results of the research indicate that main factor of affecting the dismissal of the elected legislative candidate, Novianus YL Patanduk of DPRD of South Sulawesi Province is because of not paying mutual assistance money (witness money) required by the party. Besides, there are allegations of vote gained by Risfayanti Muis of PDIP which results in detrimental to the vote gained in PDIP internal party. The dismissal of Novianus gives an opportunity to Risfayanti Muis to be elected as a legislative member because he gets the second highest vote of the total seats won by the PDIP.

Key words: dismissal, political party, witness money

Optimization Software:
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah,SWT atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul " Pemecatan Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD Partai PDI Perjuangan Pemilu 2019 akhirnya terselesaikan dengan baik.

Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada Bpk Prof.Dr.Muhammad,.SIP,.M.Si sebagai Pembimbing I, dan Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, SIP,.M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan segala ketulusan dan keihlasan dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini serta atas Ilmu yang di berikan selama masa studi pada Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis pun menyadari sebenarnya tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan, motivasi semangat dan do'a dari beberapa pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Armin,M.Si, Ibu Dr. Ariana, S.IP,.M.Si, Bapak Drs.H.A.Yakub, Ph.D selaku penguji yang telah memberikan masukan masukan yang sangat berguna sehingga makin memperkaya analisis ini.
2. ak almarhum Prof.Dr. Kausar Bailusy,MA sebagai Dosen bimbing I dan Bapak Prof.Dr. Andi Gau Kadir,M.Si selaku penguji

Optimization Software:
www.balesio.com

yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dan memperkaya ilmu penulis.

3. Lembagaku tercinta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister.
4. Bapak Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Program Studi Ilmu politik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diberikan selama masa studi.
5. Bapak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Arif Budiman, S.S,.SIP,.MBA, dan Bapak Hasyim Asyari,SH.,M.Si,.Ph.D
6. Ibu DR. Sri Nuryanti, S.IP,.MA yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
7. Bapak dan Ibu Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas perkenan waktu wawancara dan diskusi serta rekan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yakni Ibu Julita Rahayu Kasubag Hukum dan Bapak Muhammad Asri Kasubag Tekhnis dan rekan staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Ibu tercinta Hajja Sarintang, almarhum Ayahanda Muhammad Aminuddin, dan Adik adikku yang tercinta Amrin, Asma, Ariyanti,Anita dan Ahyuni yang selalu memberi semangat yang tidak pernah berhenti.
9. Suamiku tercinta Faisal Amir SE,.MM, Putri dan Putra tercintaku Nur haratun Nisa Auliyah, Nur Syahrul Badiullah, dan Nur Darul Aslam un yang tiada henti menyemangati.

Optimization Software:
www.balesio.com

10. Saudara saudariku seperjuangan di Netfid Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Mardiana Rusli, Uki, Sitti Hamidah, Upi untuk selalu memotivasi mendukung dan berjuang untuk terus belajar.
11. Terima kasih atas kebersamaannya teman Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Politik Tata kelola Pemilu dan Politik Local Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Sahabatku Andi Anisa, Mega, Wijaya, Asfira, Afif, Mulawarman, Annisa Nurdiasa, Wulan, Zulfikar dan Kafrawi serta yang lain yang memberikan kesempatan untuk bersilaturrahim semoga menjadi berkah bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan karena manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Sekian

Makassar, Agustus 2020

Anriani

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN ABSTRAK …..... iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

2.1 Pendekatan Kelembagaan Baru (*New Institusionalism*) 11

2.2 Pemahaman tentang partai politik dan fungsinya*)*.....…… 18

2.2.1 Fungsi Partai Politik …… 22

2.2.2 Pelembagaan Partai Politik 26

2.3 Teori Pilihan Rasional 30

2.4 Penelitian Yang Relevan 36

2.5 Kerangka Pikir 39

BAB III METODE PENELITIAN 43

Jenis Penelitian 43

Tehnik Pengumpulan Data 45

Optimization Software:
www.balesio.com

3.3 Tehnik Menentukan informan …… 48

3.4 Sumber Data 49

3.5 Lokasi Penelitian …….. 50

3.6 Teknik Analisis Data…… …….. 50

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 52

4.1 Sejarah Partai PDI Perjuangan ……..…. 52

4.2 Visi Partai PDI Perjuangan ……. 57

4.3 Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024……..……..…64

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 78

5.1 Faktor Pemecatan Calon Legislatif terpilih DPRD hasil Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD Partai PDI Perjuangan….73

5.1.1 Partisipasi Dana Gotong Royong ……....74

5.1.2 Pelanggaran dalam Penetapan Jumlah Suara …….. 87

5.1.3 Pola Komunikasi…… 96

5.2 Implikasi Teori …… …..99

BAB VI PENUTUP ……,,, 105

6.1 Kesimpulan 105

6.1 Saran 106

R PUSTAKA …….. … 10

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Perolehan Kursi DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2019-2024……..65

Tabel 1.2

Perolehan Kursi DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2014- 2019……67

Tabel 1.3

Perolehan Kursi DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014……..…68

Tabel 1.4

Daftar Ketua DPRD Sulawesi Selatan…….……70

Tabel 1.5

Perolehan Kursi Partai Daerah Pemiliahan II Sulawesi Selatan……88

Tabel 1.6

Perolehan Suara Partai Dan Caleg Terpilih Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan……...89

Tabel 1.7
Hasil Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan Pada Pemilihan anggota Legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Sulsel……..93

Optimization Software:
www.balesio.com

Daftar Gambar

Gambar 1 Kerangka Pikir……

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi karena manjadikan partai politik sebagai institusi terpenting dan strategis serta menjadi pilar bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilihan umum (pemilu).

Partai politik di Indonesia merupakan bagian dari kehidupan politik masyarakat, terutama kita mengenal sistem multi-partai, sekalipun gejala partai tunggal dan dwi partai tidak asing dalam sejarah Indonesia. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai).[1]

Pemahaman umum tentang partai politik adalah sekelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang disatukan dan didorong oleh suatu ideology tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun. Kebijakan umum partai tersebut merupakan asil pemaduan berbagai kepentingan yang idup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertaankan

[1] udiardjo. 2013. Dasar-dasar ilmu politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal.

Optimization Software:
www.balesio.com

kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan umum itu adalah lewat pemilihan umum.[2]

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2019, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan dua belas kali pemilihan umum. Yang menarik dari pemilihan umum di Indonesia adalah yang terjadi di tahun 2019, dimana dalam pemilu 2019, pemilihan legislative dan Presiden dilakukan secara serentak berdasarkan putusan Makamah Konstitusi No 14/PUU-XII/2013. Dan ini merupakan peristiwa demokrasi yang monumental karena baru pertama kali di gelar dalam perhelatan pemilu sepanjang sejarah kepemiluan Indonesia.

Pemilihan legislatif khususunya di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 11 daerah pemilihan (dapil) dengan sebaran kursi yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Sulawesi selatan memiliki alokasi kursi 85 anggota legislatif dengan sebaran kursi yaitu: daerah pemilihan (dapil) 1 11 kursi, : daerah pemilihan (dapil) II 6 kursi, daerah pemilihan (dapil) III 9 kursi, daerah pemilihan (dapil) IV 7 kursi, daerah pemilihan (dapil) V 6 kursi, daerah pemilihan (dapil) VII 7 kursi, daerah pemilihan (dapil) VIII 7 kursi, daerah pemilihan (dapil) IX 9 kursi, daerah pemilihan (dapil) X 9 kursi dan daerah pemilihan (dapil) XI 11 kursi. Tiap partai politik melakukan sistem rekrutmen untuk menempatkan kader terbaiknya ditiap daerah pemilihan, PDI Perjuangan sebagai salah satu peserta pemilu mengikuti segala

---

[2] Usman Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi Politik. PRENADAMEDIA. Jakarta. Al. 277-278

Optimization Software:
www.balesio.com

rangkaian pemilu termasuk mendaftarkan, dan pembekalan calon legislatif untuk mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik.

Partai PDI Perjuangan berhasil meraih total 8 kursi dari 11 daerah pemilihan (dapil) di Sulawesi Selatan yaitu: daerah pemilihan (dapil) 1, daerah pemiliahan (dapil II, daerah pemilihan (dapil) V, daerah pemilihan (dapil) VI, daerah pemilihan (dapil) VII, daerah pemilihan (dapil) VIII, daerah pemilihan (dapil) IX, daerah pemilihan (dapil) X, daerah pemilihan (dapil) XI, dari ke 8 perolehan kursi salah satu daerah pemilihan (dapil) terjadi sengketa antara internal partai yaitu daerah pemilihan (dapil) II.

Proses pemecatan terjadi salah satu calon anggota legislative terpilih di daerah pemilihan (dapil) II Sulawesi selatan, meski sudah mengikuti segala rangkaian tahapan telah dilewati partai PDI Perjuangan mulai dari pencalonan, sampai pada tahap penetapan kader terpilih, partai PDI Perjuangan mencalonkan kadernya untuk ikut pemilu ke Komisi pemilihan Umum (KPU), dan proses di KPU berdasarkan tahapan dari daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap sehingga ditetapkan oleh kpu melalui sidang pleno bahwa calon yang diusung oleh partai PDI-Perjuangan untuk anggota legislative DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersyarat ikut dalam pemilu.

Setelah proses yang dilalui tersebut, terjadi pemecatan yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan terhadap calon legislatifenya sendiri rpilih berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan di tingkat Sulawesi selatan di wilayah dapil 2 yang meliputi wilayah Makassar

Optimization Software:
www.balesio.com

B: Panakkukang, Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea. Calon yang merupakan kandidat dari partai PDI Perjuangan di pecat oleh partai PDI Perjuangan sendiri berdasarkan putusan dewan mahkamah partai PDI Perjuangan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemecatan novianus YL Patanduk sebagai kader PDIP bukan tanpa alasan, secara dadakan dan tanpa bukti-bukti kuat, semua melalui proses panjang, melalui mekanisme partai, melalui proses di dewan kehormatan sebelum surat pemecatannya keluar. Novianus selain tidak membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS) pada pileg 2019 lalu, juga melakukan gerakan tambahan lain yang dapat merugikan serta merusak nama baik partai.[3]

Berdasarkan anggaran dasar rumah tangga (Adrt) partai PDI Perjungan melakukan pemecatan terhadap Novianus YL Patanduk karena baru melakukan pembayaran dana gotong royong atau saksi setelah proses pemilihan, namun saat itu ditolak dengan alasan sudah terlambat. Karena minimnya dana (kurangnya modal) dan juga focus novianus saat itu adalah untuk bagaimana memperoleh suara. Dana gotong royong yang harus dibayar, senilai 20 juta. Terkait pemecatannya, novianus mengatakan belum berencana melakukan perlawanan atau mengambil jalur hokum, dia memilih mengambil langkah persuasive dan berharap pengurus partai kembali mempertimbangkan SK pemberhentian tersebut.

akassar.tribunnews.com/2019/09/22/dipecat-pdip-novianus-patanduk-tetap-ikut-tikan-anggota-dprd-sulsel

Optimization Software:
www.balesio.com

Pemecatan yang terjadi dalam internal partai PDIP adanya permasalahan internal partai terkait kepentingan dengan memperhitungankan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang diambil tersebut, mengingat Hasil pemilu serentak tahun 2019 calon legislative DPRD provinsi daerah pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan dari PDI-Perjuangan dimenangkan oleh Novianto Y.L Patanduk, S.E dan dinyatakan oleh KPU menjadi calon terpilih dengan perolehan suara 4.305. Permasalahan yang muncul kemudian adalah terjadi pemecatan calon terpilih anggota legislatif DPRD provinsi Sulsel di dapil II makassar B oleh partai PDIP setelah ditetapkan berdasarkan perolehan suara oleh KPU.

Pemberhentian keanggotaan Novianus oleh DPD Partai PDIP, maka digantikan oleh Risfayanti, sebagai calon legislative dengan perolehan suara terbanyak kedua setelah Novianus. Pergantian ini juga mengisyaratkan dan memperkuat adanya permasalahan terkait kepentingan dalam internal partai dengan melakukan *bargaining position*.

Terpilihnya Risfayanti sebagai kader terpilih karena secara rasional partai melihat bahwa risfayanti adalah kader partai PDIP yang juga LO sedangkan Novianus jika berpacu dalam aturan ideal partai, belum dapat dikatakan sebagai kader partai karena belum mencukupi masa keanggotaannya selama 5 tahun (belum memenuhi syarat menjadi kader partai.

PD Partai Politik mengajukan Risfayanti Muin menggantikan
s selain secara perolehan suara terbanyak kedua serta dinilai

Optimization Software:
www.balesio.com

mampu menjalankan kepentingan partai yang disepakati bersama dalam internal partai PDIP. Pergantian yang terjadi antara Novianus dan Risfayanti juga mengundang pertanyaan baru mengenai pelembagaan partai politik. Agar sebuah kepartaian mampu menopang secara kokoh jalannya demokrasi dan stabilitas politik, pelembagaan kepartaian menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan. Pelembagaan kepartaian akan menjadikan partai bekerja dalam koridor fungsi-fungsi yang semestinya. Dalam literature kepartaian dikenal dua pemikiran tentang pelembagaan, yaitu pelembagaan sistem kepartaian dan pelembagaan partai politik. Dalam kasus ini termasuk dalam pelembagaan partai politik yaitu merujuk pada proses dimana partai politik tertentu mendapatkan nilai baku dan stabil. Dimensi pelembagaan partai politik diantaranya derajat kesisteman, otonomi keputusan, reifikasi, dan penanaman nilai dalam masyarakat.[4]

Aturan yang menjadi ketetapan partai PDI Perjuanagan yang dilanggar oleh Novianus YL Patanduk sehingga mengeluarkan otonomi keputusan yaitu pemecatan. Alasan terjadinya pemecatan calon legislative terpilih tersebut disebabkan oleh pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Novianus yakni tidak membayar uang Gotong Royong. Sesuai dengan peraturan KPU terkait penggantian calon DPR terpilih, diganti oleh calon dengan perolehan suara terbanyak kedua, dalam hal ini risfayanti maju menggantikan posisi novianus berdasarkan perolehan suara yang

[4] ungkas. 2011. Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia. Institute for Democracy and Yogyakarta. Hal. 62

Optimization Software:
www.balesio.com

ditetapkan oleh KPU setelah terjadinya pemecatan novianus oleh DPW PDI Perjuangan provinsi Sulawesi Selatan.

Pilihan rasional partai PDI Perjuangan dari pergantian calon terpilih, peralihan dari Novianus YL Patanduk kepada Risfayanti adalah, secara individual Risfayanti memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dalam partai PDI Perjuangan, mengingat Risfayanti adalah kader PDI P yang menjabat sebagai pengurus DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan sebagai sekertaris internal dan ketua badan saksi partai nasional (BSPN) Provinsi Sulawesi Selatanl dan juga sebagai LO, sedangkan Novianus belum mencapai masa keanggotaan 5 tahun dalam partai PDI Perjuangan, sehingga naiknya Risfayanti sebagai calon terpilih DPRD provinsi Sulsel dapat mengisi kursi DPRD Dapil II Makassar B dari Partai PDI Perjuangan, namun disisi lain, secara kuantitas (jumlah) suara, Risfayanti kalah saing dengan Novianus, karena keunggulan novianus berada diperolehan pertama berdasarkan surat keputusan KPU provinsi Sulsel no. 158/pl.01.9.kot/73/provVIII2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum DPRD provinsi sulawesi selatan dengan perolehan suara 4.305. dengan kata lain pemecatan novianus dan majunya risfayanti sebagai calon terpilih anggota legislative terpilih DPRD sulsel setelah menggantikan novianus di sinyalir sebagai tindakan atau pilihan rasional partai PDIP dengan mempertimbangan keuntungan dan kerugian dari masing-masing calon.

Pemecatan calon legislative terpilih DPRD Sulawesi Selatan oleh rtai PDIPerjuangan menjadi salah satu bukti eksistensi partai poltik.

Optimization Software:
www.balesio.com

Dalam hal ini partai PDIPerjuangan menunjukkan kekuatan partai dalam keputusan pemecatan kandidatnya yang telah memenangkan suara terbanyak ditempat pemilihan (Dapil II wilayah Makassar B). Makna ”kekuasaan” dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi anomali yang akan terus mengikis demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis akan mengkaji mengenai faktor-faktor pemecatan calon anggota legislatif terpilih DPRD Provinsi Sulawesi selatan dari partai PDI Perjuangan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Fenomena yang terjadi dalam penjelasan dilatarbelakang di atas, mengisyaratkan bahwa adanya nilai-nilai baku, aturan dan norma yang ditetapkan oleh partai serta merta harus selaras dengan visi misi kader yang membawa kepentingan partai itu sendiri. Secara sah partai memiliki otonomi kekuasaan dalam mengambil keputusan, hal ini juga bagian dari pelembagaan partai politik, dengan begitu membuat posisi partai semakin kuat, namun dengan permasalahan (kasus) pemecatan yang terjadi di Sulawesi selatan terhadap calon legislative terpilih Novianus juga perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai dinamika partai politik dalam penetapan calon terpilih, serta alasan terjadinya pemecatan calon legislative terpilih DPRD provinsi sulawesi selatan pemilu serentak tahun 2019 oleh PDIP. Rumusan masalah penelitian yaitu: Mengapa DPD partai PDI

Optimization Software:
www.balesio.com

Perjuangan melakukan pemecatan terhadap calon anggota legislatif terpilih Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini yaitu: Mengetahui dan menganalisa alasan terjadinya pemecatan calon legislative terpilih DPRD Sulawesi Selatan oleh DPD PDI Perjuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

a. Memperkaya kajian ilmiah terhadap dinamika partai politik, dengan melihat dari sudat pandang sistem kelembagaan partai politik dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini keputusan partai PDI Perjuangan dalam pemecatan calon legislative terpilih DPRD Sulawesi Selatan pemilu serentak tahun 2019.
b. Memperkaya kajian ilmiah terhadap analisa teori pertukaran dengan pertimbangan *bargaining position* terkait keuntungan dan kerugian yang di dapatkan oleh kedua belah pihak dalam permasalahan pemecatan tersebut.

Manfaat Praktis

a. Bahan rujukan bagi masyarakat khususnya akademisi, mahasiswa maupun para peneliti yang memiliki ketertarikan pada ilmu politik dan tata kelola pemilu khususnya pada dinamika yang terjadi didalam nal partai politik. Dalam hal ini terkait proses dan alasan pemecatan

Optimization Software:
www.balesio.com

calon legislative terpilih DPRD Sulawesi Selatan oleh DPD partai PDI Perjuangan.

b. Menambah literasi masyarakat terhadap fungsi peran partai dalam mengambil keputusan, dalam hal ini keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari pemecatan.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Kelembagaan Baru (*New Institusionalism*)

Berbeda dengan *old institusionalism*, bahwa *new institusionalism* lebih mencermati bukan hanya sekedar dampak institusi terhadap individu, akan tetapi juga bagaimana interaksi antara individu dengan institusi. Pendekatan Institusional baru lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi. Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya. Metode ini memberikan perhatian bahwa institusi mengakibatkan perilaku politik individu.

Rod Rhodes: Pendekatan institusional adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal. Ia memakai ahli hukum dan sejarahwan untuk menjelaskan batas-batas pada politik maupun efektifitas demokratis, dan ia membantu

Optimization Software:
www.balesio.com

perkembangan model westmister tentang demokrasi representatif. Tahun 1980-an, perhatian terhadap lembaga formal dan non-formal pada sektor publik dan bagaimana peran penting struktur, mulai tumbuh kembali. Penjelasan kelembagaan digunakan dalam studi kebijakan dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperhatikan perilaku pada tingkat individu.

Pendekatan institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik, disamping, juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori dan analisis empiris. Sebagai contoh : “institusionalisme lama” sistem presidensial secara signifikan berbeda degan sistem parlementer berdasarkan struktur formal dan aturan. Pendekatan “institusionalisme baru”, melihat lebih jauh dan mencoba untuk mencari tahu apakahperbedaan-perbedaan tersebut benar-benar berbeda, dan jika demikian, bagaimana mengatur kehidupan politik yang berbeda tersebut? Apakah perbedaan tersebut lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal kinerja pemerintah?. Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, lebih jauh, juga merefleksikan bahwa pendekatan insitusionalisme baru juga melihat bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga-lembaga tersebut direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu.

Akar ilmu politik adalah pada studi-studi tentang lembaga, tentang gaan negara, birokrasi, kebijakan publik, yang kesemuanya dilihat erangka kelembagaan. Tetapi pada periode pasca Perang Dunia II,

Optimization Software:
www.balesio.com

disiplin ilmu politik, terutama di Amerika Serikat, telah mengkritik studi tentang lembaga-lemabaga tersebut dengan berkembangnya dua pendekatan yang lebih didasarkan pada asumsi individualistik : behavioralisme dan pilihan rasional. Kedua pendekatan ini mengasumsikan bahwa individu bertindak secara otonom sebagai individu, baik berdasarkan karakteristik sosio psikologis atau perhitungan rasional untung rugi oleh individu. Dalam kedua teori, individu tidak dibatasi oleh baik lembaga formal maupun informal, tapi akan membuat pilihan mereka sendiri. Faktor individu dipandang lebih determinan dalam prosesproses berjalannya lembaga-lembaga negara, serta pada keputusan-keputusan politik[5]. Hal ini merupakan titik tolak dari perkembangan pendekatan *"new institutisionalism*" atau pendekatan institusionalisme baru**.**

Hall dan Taylor[6] membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (*historical institutionalism)*, institusionalisme pilihan rasional *(rational choice institutionalism)* dan institusionalisme sosiologis *(sociological institutionalism).* Institusionalisme historis berkembang sebagai respons terhadap teori-teori kelompok politik dan struktural-fungsionalisme yang menonjol dalam ilmu politik selama 1960-an dan 1970. Dari teori kelompok, institusionalis historis menerima anggapan bahwa konflik itu di antara kelompok yang saling bersaingan untuk sumber daya yang langka. Mereka

G.2011. *Institutional Theory InPolitical Science: The NewInstitutionalism*. Bloomsbury USA.Hal.25

, & Taylor, R. C. 1996. *Political Science and TheThree New Institutionalisms*. Political (5), 936-957. Hal.9.

Optimization Software:
www.balesio.com

menemukan penjelasan seperti itu dalam organisasi kelembagaan pemerintahan dengan konflik struktur ekonomi untuk mengistimewakan beberapa kepentingan sambil melumpuhkan orang lain. Di sini, mereka dibangun di atas tradisi lama dalam ilmu politik yang menetapkan kepentingan formal lembaga-lembaga politik tetapi mereka mengembangkan konsepsi yang lebih luas dari keduanya akan pentingnya institusi.

Para institusionalis historis juga dipengaruhi oleh cara dimana fungsionalis struktural melihat pemerintahan sebagai sistem keseluruhan dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Mereka menerima anggapan ini tetapi bereaksi melawan kecenderungan structural fungsionalis untuk melihat ciri-ciri sosial, psikologis atau budaya individu. Sebagai gantinya, mereka melihat organisasi kelembagaan politik atau ekonomi politik sebagai faktor utama menyusun perilaku kolektif dan menghasilkan hasil yang berbeda. Mereka menekankan 'strukturalisme' yang tersirat dalam lembaga-lembaga pemerintahan daripada 'fungsionalisme' dari pendekatan sebelumnya yang memandang hasil-hasil politik sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sistem.

Apa yang kita sebut institusionalisme sosiologis muncul dalam subbidang teori organisasi. Pergerakan ini kira-kira mendekati akhir tahun 1970-an, ketika beberapa sosiolog mulai menantang perbedaan yang tradisional antara bagian-bagian dunia sosial yang dikatakan minkan tujuan formal 'rasionalitas' dari jenis yang terkait dengan

Optimization Software:
www.balesio.com

bentuk-bentuk organisasi dan birokrasi modern dan bagian-bagian dari dunia sosial dengan menampilkan beragam praktik yang terkait dengan'budaya'. Sejak Weber, banyak sosiolog telah melihat struktur birokrasi yang mendominasi *landscape modern*. Di bidang pemerintahan, perusahaan, sekolah, organisasi kepentingan dan sejenisnya, sebagai produk dari upaya intensif untuk menyusun struktur yang semakin efisien untuk melakukan tugas-tugas terkait dengan masyarakat modern.

Institusionalis baru dalam sosiologi mulai berargumen bahwa banyak bentuk dan prosedur institusional yang digunakan oleh organisasi modern tidak diadopsi hanya karena mereka paling efisien untuk tugas-tugas yang dikerjakan, sejalan dengan beberapa "rasionalitas transenden." Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa banyak dari bentuk dan prosedur ini harus dilihat sebagai praktik budaya tertentu, seperti mitos dan upacara yang dibuat oleh banyak masyarakat, dan berasimilasi ke dalam organisasi, tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi cara-formal mereka, tetapi sebagai hasil dari jenis proses yang terkait dengan transmisi praktik budaya lebih umum.

Perspektif ini, problematis yang biasanya diadopsi oleh institusionis sosiologis mencari penjelasan mengapa organisasi mengambil seperangkat bentuk, prosedur, atau simbol kelembagaan tertentu; dan menekankan bagaimana praktik tersebut disebarkan melalui bidang organisasi atau lintas negara. Mereka tertarik, misalnya, dalam skan kesamaan yang mencolok dalam bentuk dan praktik si yang ditampilkan oleh Kementerian Pendidikan di seluruh dunia,

Optimization Software:
www.balesio.com

terlepas dari perbedaan kondisi lokal, atau bahwa perusahaan menampilkan lintas sektor industri apa pun produk yang mereka produksi. Dobbin menggunakan pendekatan untuk menunjukkan bagaimana konsepsi negara dan pasar yang dibangun secara kultural mengkondisikan kebijakan perkeretaapian abad ke-19 di Prancis dan Amerika Serikat.

Institusionalisme pilihan rasional berawal dari studi tentang perilaku kongres di Amerika, dimana terdapat perbedaan yang beragam dan tajam terhadap preferensi dan karakteristik legislator mengenai kebijakan. Tetapi meski terjadi perbedaan yang tajam, kongres masih menunjukkan situasi yang cukup stabil. Fenomena ini memunculkan pertanyaan bagaimana institusi dengan perbedaan yang tajam masih dapat berjalan dengan stabil. Salah satu penjelasannya adalah adanya transaksi atau tawar menawar di antara para legislator dalam perumusan atau kesepakatan terhadap kebijakan tersebut.

Terdapat proses-proses politik berdasarkan pertimbangan untung rugi untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama[7]. Institusionalisme pilihan rasional melihat proses institusionalisasi dan relasi antar institusi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan bersama melalui pertimbangan-pertimbangan rasional dan untung rugi. Dalam pandangan institusionalisme pilihan rasional-seperti halnya teori pilihan rasional-manusia secara individual-yang juga merupakan representasi dan sebuah dipandang sebagai individu rasional yang bertindak atas dorongan

Optimization Software:
www.balesio.com

kepentingan rasional, didasari oleh perhitungan ekonomis, untung rugi, memaksimalkan keuntungan dan aksi-reaksi dari aktor lainnya. Asumsi mendasar dari institusionalisme pilihan rasional adalah bahwa individu adalah aktor sentral dalam proses politik, dan bahwa orang-orang bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas pribadi. Salah satu mencapai tujuan tersebut secara efektif adalah melalui tindakan institusional, dan perilaku mereka juga dibentuk oleh lembaga[8] .

Tindakan individu mempengaruhi lembaga, tetapi juga diatur oleh aturan-aturan dalam lembaga. Karena itu, tindakan atau keputusan lembaga, juga dapat merefleksikan tindakan individu. Institusionalisme pilihan rasional melihat keseimbangan institusional sebagai norma atau aturan-baik formal maupun informal-yang disepakati bersama. Pendekatan ini melihat bahwa keadaan normal politik adalah dimana aturan permainan yang stabil dan para aktor memaksimalkan keuntungan (biasanya keuntungan pribadi) yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut. Para aktor mempelajari aturan-aturan, strategi adaptasi dan dengan demikian melahirkan keseimbangan institusional. Meski tidak semua aktor merasa senang atau diuntungkan dengan struktur kelembagaan yang terbentuk, tetapi yang menjadi tujuan adalah pada kondisi yang stabil. Setelah stabil, sangat sulit untuk mengubah aturan karena tidak ada yang bisa memastikan hasil dari struktur yang terbentuk[9].

Optimization Software:
www.balesio.com

G. 2011. *Institutional Theory inPolitical Science: the newinstitutionalism*. Bloomsbury USA.Hal.45

A., & Foweraker, J. 2001. *Encyclopedia Of Democratic Thought.* Taylor & Francis. Hal

2.2 Pemahaman Tentang Partai Politik Dan Fungsinya

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.Organisasi negara pada ha32kikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat.Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati Nurani.[10]

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik organisasi yang terstruktur baru muncul pada tahun 1830 sebagai

t Muchamad. 2011. Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam Republik. Rajawali pers.Hal 4-5.

Optimization Software:
www.balesio.com

wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaanterpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.[11]Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.[12]

Menurut R.H Soltau partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam peroses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasaikekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu gaolongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.[13]

---

on Samuel P.2003.Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa. Jakarta: raja ersada. Hlm.472

Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Hlm.

n H.I, 2007, Sistem Politik Indonesia. Jakarta: gratha ilmu. Hlm. 102

Optimization Software:
www.balesio.com

Menurut Edmund Burke, partai politik adalah kumpulan orang – orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka berdasarkan pada prinsip – prinsip tertentu yang mereka semua sepakati.[14] Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik.Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.[15]

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta mempelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga

---

urke. Richard S, Katz dan William Crotty, Handbook Patai Politik. Bandung : Nusa
4 hlm.4

t Muchamad. 2011.Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam
Republik. Rajawali pers.Hal 31

Optimization Software:
www.balesio.com

berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir. Mirriam budiardjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benarbenar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang hitrogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.[16]

Zarkasih Nur, mengatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Partai politik sebagai pilar sistem demokrasi berperan sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Daribeberapa fungsi partai politik yang di jelaskan di atas fungsi rekruitmen adalah fungsi yang paling mendasar dalam keikutsertaan pada setiap Pemilu ataupun

---

Budiarjdo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pemilukada fungsi rekruitmen ini menjadi hal yang mendasar karna dari fungsi rekruitmen ini partai politik bisa mengusung hasil kader yang di anggap mampu untuk maju bersaing dalam Pemilu ataupun Pemilukada.

2.2.1 Fungsi Partai Politik

Untuk memahami peran partai politik, akan lebih mudah apabila memahami terlebih dahulu fungsi dari partai politik seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo bahwa terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut:

a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan *(interest aggregation)*. Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang *(interest articulation).* Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan[17].

Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan ng kemudian dimasukan dalam program atau platform partai untuk

an, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal 103-104

Optimization Software:
www.balesio.com

diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum *(public policy)*. Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubungan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat[18].

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok[19].

b. Sosialisasi Politik

Optimization Software:
www.balesio.com

Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta. Hal 406

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush dalam A. Rahman H.I., 2007 adalah sebagai berikut.

> *"political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena (Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik)*"

Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri awah kepentingan bersama[20].

an, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal 103-104

Optimization Software:
www.balesio.com

c. Rekrutmen Politik

Rekruitmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart dalam A. Rahman H.I., dikatakan bahwa perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik[21].

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya Negara dmokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan engenai keputusan keputusan politik yang diambil pemerintah.

Optimization Software:
www.balesio.com

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

2.2.2 Pelembagaan Partai Politik

secara umum. pelembagaan parpol dalam pengertian klasik Huntington adalah ketika aganisasi langsung telah mendapatkan 'value (nilai) “ dan stabililty (stabilitas). Jika parpol telah berhasil memformulasi menginternalisasikan nilai nilal oganisasionalnya serta dalam periode Waktu terentu: terdapat stabilltas Internal, maka parpol dapat dikatakan terlembagakan dengan baik

Pelembagaan parpol dengan demikian bagi Guillermo 0’D0nnell melibatkan dua aspek pemting, yaitu 'value infusion (nllal Pemasukan) dan ," behavioral routinlzatlon (rutinitas perilaku). Yang pertama merupakan suatu.proses dimana para anggota menggeser fokus dari tuiuan-tujuan besa kepentingan Individual yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar is parpol. Dari sini maka parpol akan dapat mengembangkan si penerimaan di masyarakat, dan tentunya mengakarnya parpol

Optimization Software:
www.balesio.com

rootedness). Sementara itu behavioral routimzarlon terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang stabil“, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan Normal tenanam dl dalam pola-pola tersebut sehingga akan ada prediktabilitas dan regulasi perilaku dan ekspektasI-ekspektasl dari para anggota, pengurus parpol, maupun masyarakat luas lainnya.‘ Hal Ini tentu tidak mudah, karena selalu saja ada upaya-upaya pembajakan parpol oleh segelintir elit maupun oligarki parpol untuk kepentingan politik sempit mereka. Juga terkadang parpol tldak blsa mengelola rutinisasi perilaku ini karena terciptanya dysfunctional factionalism (dusfungsional faksionalisme) yang membuat parpol suli untuk menjadi aktor politik yang solid dan Iunggal akibat pertarungan faksI-faksl yang tajam

Vicky Randall dan Lats Svasand menyebutkan bahwa pelembagaan parpol melibatkan setidaknya empat variabel penting. yaitu: 'systemness (kesistemannya), decisional autonomy (putusan otonomi). value Infusion (nilai pemasukan), dan reificatlon. Systemness (kesisteman reifikasi). merujuk pada pengelolaan lnfrastruktur parpol dan dinamika lnternalnya: decisional autonomy, terkait dengan hubungan parpol dan lingkungan eksternalnya, khususnya menyangkut otonomi politik dan finansial, keterkaitannya dengan organisasi massa. dan kemampuan parpol untuk otonom dari permainan politlk dl tingkat nasional dan lokal; value Infusion, mirip dengan pemahaman di atas, terkait dengan dimensi attitudinal (nllai-slkap) pelembagaan parpol dlmana nilai-nilai ldeologis yang dapat dan melekat pada para anggota atau pendukung menjadi perhatian

Optimization Software:
www.balesio.com

utama: dan terakhir, reincation terkalt dengan kemampuan parpol untuk menanamkan suatu citra atau brand name (merek) tenentu dl benak para pemilih.' JIka suatu parpol bisa mengelola keempat varabel tersebut dengan baik. maka dapat dikatakan parpol tersebut mengalami pelembagaan parpol yang optimal. dengan hasilnya tentu adanya stabiliitas organisasi. Efektitivitas peran dan posisi politiknya. menguatnya basis konstitusi dan penerimaan pemilih serta adanya dinamika intenal yang mendetong solidaritas parpol

Pelembagaan partai politik juga sangat dipengaruhi oleh the nature of the party law (sifat dari peraturan portai). Sebagai lembaga demokrasi yang bentuk. operasi. dan eksistensinya diatur oleh UU, patpol seringkali tidak memiliki banyak pilihan atau mempunyai intensif sistemik untuk memperkuat pelembagaan operasionalnya. Pada umumnya, UU parpol suatu negara akan mengikuti apa yang oleh Kenneth Janda sebut sebagai pola 5P, yaitu 'to proscribe, permit, promote, protect, or prescribe.' (untuk mengharamkan, izin, mempromosikan, melindungi, atau menentukan). Secara arti luas. prescription model terkait dengan pelarangan atau pernyataan pelarangan suatu parpol karna aktifitas atau kebijakannya, termasuk di dalamnya adalah pencegahan parpol untuk melakukan tindakan atau aktivitas tertentu; permission model merujuk pada haI-hai dan batasan-batasan yang dibolehkan untuk dilakukan parpol dalam nya; promotion model berarti memajukan, mendorong. mendukung n dan aktivitas parpol; protection model menyangkut pengamanan

Optimization Software:
www.balesio.com

terhadap parpol, baik dengan penentuannya sebagai aktor utama dalam poilitik atau terkait dengan pencegahan terhadap upaya-upaya yang dapat merugikan atau menimbuikan beban bagi parpol resmi; serta model terakhir yakni prescribe model terkait dengan perintah atau mewajibkan parpol untuk menuruti kebijakan politik negara tenentu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mendukung peran maupun fungsinya.

Suatu parpol yang hidup dalam UU yang didominasi dengan semangat atau aturan pelaraangan (prescription model) tertentu akan mengalamii banyak kendala maupun keterbatasan untuk melakukan berbagai Inovasi dan improvisasi kelembagaan untuk merespon tantangan dan dinamika internal. Dalam model ini, parpol juga seolah-olah berada dalam posisi yang Inferior terhadap pemerintah karena kuatnya peran pemerintah dalam pengaturan kehidupan parpol, termasuk di dalamnya pelaraangan maupun pembatasan aktivitas. Model yang sekiranya mendukung pelembagaan parpol adaiah Yang memuat banyak unsur promotion dan protection karena dengan demikian parpol didorong, difasiiitasi, dan dijamin eksistensinya untuk mengembangkan kemampuannya untuk mengoptimaikan fungsi dan perannya. Dalam banyak hal, parpol sangat membutuhkan perlindungan dari negara SUDaya eksistensi parpol sebagai lembaga demokrasi tidak dibajak oieh segelintir elit atau pimpinannya untuk kepentingan politik sempit yang transaksionl pragmatis iainnya dan mengorbankan kepentingan anggota dan parpolnya

Optimization Software:
www.balesio.com

2.4 Teori Pilihan Rasional

Rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rasio, yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Jadi yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis. Atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing.

Rasionalitas mucul ketika dihadapkan sama banyaknya suatu pilihan pilihan yang ada di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan.

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan ersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai sional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih

Optimization Software:
www.balesio.com

tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya.

Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu aktor. Aktor dianggap sebagai individu yang memiiki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki

kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor. Coleman juga menjelaskan mengenai interaksi antara aktor dengan sumber daya ke tingkat sistem sosial. Basis minima untuk sistem sosial adalah tindakan dua orang aktor, dimana setiap aktor dalikan sumber daya yang menarik perhatian bagi pihak lain. Aktor mempunyai tujuan, dan masing-masing bertujuan untuk imalkan wujud dari kepentingannya yang memberikan ciri saling

Optimization Software:
www.balesio.com

tergantung pada tindakan aktor tersebut. Pada kehidupan nyata, Coleman mengakui bahwa individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional. Tetapi dalam hal ini akan sama saja apakah seorang aktor dapat bertindak dengan tepat menurut rasionalitas seperti yang biasa dibayangkan ataupun menyimpang dari cara-cara yang diamati.

Tindakan rasional individu dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada hubungan mikro-makro, ataupun bagaimana cara hubungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Teori pilihan rasional berangkat dari tujuan atau maksud aktor, tetapi pada teori ini memiliki pandangan terhadap dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya, bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, maka pencapaian tujuan cenderung lebih mudah. Hal ini berkorelasi dengan biaya, pemaksa utama, dan yang kedua adalah tindakan aktor individual, tindakan aktor individual disini adalah lembaga sosial.

Teori ini lebih menekankan aktor yang disini diartikan sebagai individu yang melakukan sebuah tindakan. Tindakan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sebuah perubahan sosial. Ketika para petani memilih suatu pilihan untuk bertahan dalam kondisi yang susah, terlebih lagi pada musim paceklik. Strategi bertahan hidup petani miskin merupakan sebuah yang didalamnya memiliki sebuah tindakan yang dilakukan oleh dan dianggap rasional. Dan tindakan tersebut dapat membuat

Optimization Software:
www.balesio.com

perubahan pada hidupnya, yaitu merubah cara untuk mempertahankan hidupnya di musim yang sangat tidak menguntungkan itu.

Aktor memegang peranan yang sentral untuk melakukan sebuah tindakan. Setiap pilihan yang dipilih dalam memutuskan pemecatan terhadap kader partainya dengan alasan tidak tunduknya terhadap aturan partai, Tindakan yang dipilih dengan memilih kader lain yang menggantikan suatu jabatan politik dianggap rasional karena akan dianggap lebih memberikan keuntungan di internal partai. Teori pilihan rasional ini menekankan bahwa aktor menjadi kunci terpenting di dalam melakukan sebuah tindakan. Aktor disini bisa dikatakan sebagai individu atau Negara yang melakukan suatu tindakan untuk mencapai kepentingannya dan berusaha memaksimalkan kepentingannya. Hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan cara mengambil atau memilih suatu pilihan yang dianggap membawa hasil untuk mencapai kepentinganya tersebut. Sebagai contoh, jika pilihan 1 dianggap lebih penting dan lebih bermakna dari pada pilihan 2, dan 3, maka aktor akan memilih pilihan 1.

Posisi Aktor sebagai individu yang melakukan sebuah tindakan. Aktor tersebut dapat mengatur dirinya sendiri, karena aktor tahu apa yang ia mau dan yang harus dilakukan. Teori pilihan rasional merupakan alat untuk berpikir logis, berfikir rasional, didalam membuat suatu keputusan. alnya dengan para petani miskin yang memilih suatu pilihan yang p paling rasional (sesuai dengan akal) dibandingkan dengan ilihan lainnya untuk tetap dapat mempertahankan hidupnya dan

Optimization Software:
www.balesio.com

menyambung kehidupannya. Strategi atau cara yang diambil merupakan suatu hal yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya hingga pada akhirnya menjadi suatu keputusan yang dipandang sangat rasional.

Boudon mengatakan bahwa teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata "rasional" dimana kata ini bermakna bahwa perilaku merupakan proses koginisi yang harus dapat dijelaskan. Selain itu teori ini juga dijelaskan menggunakan istilah "utility maximizing approach" berupa konsep bahwa seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Konsep utility maximizing approach mungkin bisa dilihat kesamaannya dengan teori pilihan rasional dari eksperimen Neumann (1959) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan "seberapa banyak pemain harus bermain untuk mendapat keuntungan maksimal?".

Konsep Teori Pilihan Rasional secara teoritik bisa sangat kuat namun ketika menjelaskan fenomena sosial menjadi sangat lemah. Pada saat memprediksi kemungkinan munculnya perilaku seseorang bisa jadi teori ini sangat bermakna sehingga survey-survey menjelang pemilihan umum menjadi sumber yang dianggap paling dipercaya untuk menjelaskan kemungkinan siapa yang akan dipilih oleh responden. Namun jika terjadi fenomena, sebagaimana ketidak-sesuaian hasil survey dalam contoh diawal maka teori ini sangat lemah dalam menjelaskan fenomena tersebut. demikian, hal ini tidak menghambat penggunaan teori ini dalam i aplikasinya terutama dalam psikologi politik, psikologi konsumen,

Optimization Software:
www.balesio.com

dan psikologi moral. Secara konseptual, teori ini masih merupakan teori yang baik dalam memprediksi perilaku seseorang dalam situasi tertentu.

Boudon mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki enam postulat, yaitu: 1. setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb., 2) perilaku dapat dipahami. Postulat pertama menunjukkan bahwa fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, diantaranya pilihan, sedangkan postulat kedua menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah rangkaian dari kejadiankejadian yang dapat dipahami. Adapun postulat ketiga merupakan postulat yang mendasari kata rasional, yaitu (3) perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada dipikiran. Postulat keempat mendasarkan pada penyataan (4) bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut. Sedangkan postulat kelima berkaitan erat dengan postulat sebelumnya, yaitu (5) penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakannya oleh individu yang mengambil keputusan (egoisme). Sedangkan postulat terakhir menyatakan bahwa (6) individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya.[22]

Berdasarkan penjelasan dan uraian para ahli, penulis memposisika sesuai dengan masalah yang diangkat. Teori pilhan rasional

---

l Hafis. 2016. Teori Pilihan Rasional. Universitas Muhammadiyah . Hlm 4

Optimization Software:
www.balesio.com

digunakan untuk menganalisa Tindakan rasional yang dipilih DPP partai PDI Perjuangan Ketika memutuskan memilih memecat kader terpilih Novianus YL Patanduk pada pemilihan legislatif Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, begitupun dengan Tindakan rasional yang dipilih untuk memilih Risfayanti Muin sebagai pengganti kader yang terpilih. Sehingga teori yang digunakan bertujuan untuk menjawab pertanyaan serta membahas masalah yang berkaitan tentang pilihan rasional partai PDI perjuangan dalam melakukan suatu Tindakan dan penulis bisa memahami bagaimana karakter individu terhadap pilhan rasionalnya.

2.5 Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadi Prakarsa (2011) Dalam Tesis dengan Judul "Fungsi Partai Politik Dalam Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu Keanggotaan Legislatif Di Indonesia. Penelitian menyebutkan Dalam pembahasan terlihat bahwa fungsi parpol dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu yaitu mengusulkan pemberhentian antarwaktu terhadap anggota legislatifnya masing-masing. Perbedaan yang dapat terlihat bahwa pada periode 2004-2009 diatur di penggantian antarwaktu sedangkan pada periode 2009-2014 diatur terpisah dari penggantian antarwaktu dengan kata lain diatur sendiri namun masih belum mberikan perincian tentang fungsi parpol. Dan kewenangan parpol am hal diberhentikannya anggota legislatif yang mana sesuai

Optimization Software:
www.balesio.com

dengan peraturan perundang-undangan parpol berwenang mengusulkan diberhentikannya anggota parpolnya yang berada di keanggotan legislatif. Bila di cermati fungsi Parpol dalam pemberhentian antarwaktu dapat dilakukan prosedur yang ideal seperti perlu dilakukannya pembenahan dalam aturan-aturan yang mengatur fungsi parpol secara lebih detail agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mentapsirkan aturan yang ada. Dan pada kewenangan parpol dalam hal diberhentikannya anggota legislatif semestinya dapat melibatkan peran masyarakat seperti melalui mengumpulkan petisi (pernyataan sikap) sebanyak 10 persen suara rakyat di daerah pemilihan anggota parlemen tersebut, yang jika petisi tersebut dapat terkumpul baru anggota parlemen tersebut dapat di pecat atau juga dapat dilakukan melalui proses impeachment di pengadilan.

2. Resa Puji Atuti. Dalam jurnal ini berjudul: Konseptualisasi Larangan Pemberian Imbalan Pencalonan Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menunjukkan Perbuatan pemberian imbalan pada proses pencalonan pertama kali dikenal pada saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2018, seakan perbuatan ini begitu sangat dekat terjadi dalam Pesta demokrasi kita namun begitu sangat sulit untuk mbuktikannya. Pembuktian terhadap perbuatan ini menjadi sangat it dikarenakan beberapa aspek baik dari asepek regulasi,

Optimization Software:
www.balesio.com

wewenang pengawasan dan penindakan. Larangan terhadap perbuatan memberikan imbalan ini juga diatur dalam Undang – Undang 7 Tahun 2017 Pasal 228 dan Pasal 242 yang secara tegas melarang perbuatan pemberian imbalan dalam proses pencalonan. Namun setelah kita mencermati ketentuan yang mengatur larangan pemberian imbalan dalam Undang – Undang 7 Tahun 2017 ternyata memiliki karakter pembuktian yang sama dengan pembuktian pada Undang – Undang Pilkada. Misalnya salah satu contohnya berkaitan dengan harus adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa penerima imbalan benar – benar menerima imbalan pada proses pencalonan, selain itu adanya penjatuhan sanksi yang menjerat bagi pemberi dan menerima sehingga menjadi kesulitan tersendiri dalam menangani perbuatan ini. Terlebih lagi ketidakjelasan mekanisme pengawasan dalam mendeteksi secara dini perbuatan pemberian imbalan pada proses pencalonan ini. Kerumitan inilah yang mengantar penulis untuk melakukan konseptualisasi terhadap cara untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perbuatan pemberian imbalan pada proses pencalonan. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, yakni menganalisis konsep – konsep yang ada untun membentuk konsep baru.

Optimization Software:
www.balesio.com

rian Lopak, dalam jurnal ini berjudul Mekanisme Rekrutmen Partai itik Dalam Penetapan Calon Legislatif di Kabupaten Halmahera

Utata. Dalam penelitian ini menjelaskan Rekrutmen partai politik memberikan gambaran jelas bagaimana calon legislative mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran, penjaringan, penyaringan dan sampai pada penetapan calon anggota legislative. Namun dilematis ketika sampai pada penentuan calon tetap legislative partai politik PDI-P, karena pada titik ini terjadi pertarungan kepentingan politik individu untuk menjadi calon legislatif.

Berdasarkan penelitian di atas jika dilakukan perbandingan menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan kajian penelitian penulis. Adapun persamaan dalam lingkup kajian penulis yaitu pertam mengkaji tentang mekanisme rekrutmen partai politik mekanisme pemberhentian kader partai, dan ketiga, pemberian mahar politik terhadap partai, sedangkan perbedaan dalam kajian penulis adalah penjabaran faktor pemecatan kader terpilih pada pemilihan anggota legislatif provinsi Sulawesi Selatan, meski dalam perolehan suara di internal partai mendapatkan suara tertinggi.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan pemahaman teradap luaran yang ingin dicapai dari penelitian ini. Formulasi hubungan antara partai politik dengan calon kandidat yang maju dalam pemilihan umum dalam konteks dinamika partai politik di Indonesia semakin untuk dikaji dan akan terus menjadi bahan penelitian yang a diharap bisa memajukan system perpolitikan maupun

Optimization Software:
www.balesio.com

perlembagaan dalam demokrasi di Indonesia. Aturan dalam UUD partai politik itu sendiri menjadi tameng dan indikasi eksistensi suatu partai sehingga dapat menciptakan kesan superior ditengah masyarakat.

Pemahaman umum tentang partai politik adalah sekelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang disatukan dan didorong oleh suatu ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun. Kebijakan umum partai tersebut merupakan asil pemaduan berbagai kepentingan yang idup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertaankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan umum itu adalah lewat pemilihan umum.[23]

Dalam kasus yang dikaji oleh peneliti terkait pemecatan calon legislatif terpilih DPRD Sulawesi selatan oleh DPD Partai PDIP menjadi salah satu bukti eksistensi partai poltik. Dalam hal ini partai PDIP menunjukkan kekuatan partai dalam keputusan pemecatan kandidatnya yang telah memenangkan suara terbanyak ditempat pemilihan (Dapil II wilayah Makassar B). Makna ”kekuasaan” dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi anomali yang akan terus mengikis demokrasi di Indonesia.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan bahwa
at dari fakta yang menunjukkan telah terjadi pemecatan calon

n Usman Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi Politik. PRENADAMEDIA. Jakarta. Al. 277-

Optimization Software:
www.balesio.com

legislatif terpilih DPRD Sulawesi selatan oleh DPD Partai PDIP atas nama Novianus YL Patanduk setelah dinyatakan menang dengan perolehan suara terbanyak di dapil II wilayah Makassar B oleh KPU dan setelah hasil penelitian sementara peneliti menunjukkan bahwa pemecatan yang terjadi adalah konsenkuensi dari pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan internal partai.

Pelanggaran yang dimaksud terkait keterlambatan pembayaran uang saksi, tudingan permaian jumlah suara serta tidak terjalinnya komunikasi yang baik dengan pengurus partai dan melakukan pergerakan diluar kendali partai. Pasca pemecatan, risfayanti naik menggantikan posisi novianus yang notabennya adalah kandidat dengan perolehan suara terbanyak kedua (setelah novianus) di Dapil II wilayah Makassar B. Yang menjadi lebih menarik adalah risfayanti merupakan salah satu kader terbaik PDIP yang juga menduduki posisi-posisi penting dalam partai PDIP yang jika dibandingkan dengan novianus secara psikologis dan historis sangat jauh berbeda. Perbedaannya adalah risfayanti adalah kader dan juga pengurus partai sedangkan novianus dianggap sebagai “kutu loncat” partai.

Optimization Software:
www.balesio.com

SKEMA PIKIR

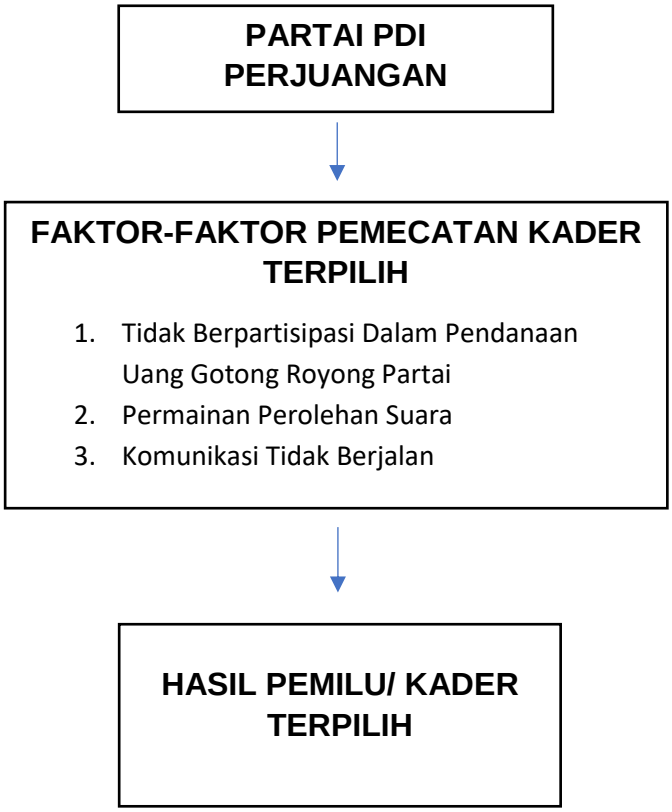

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas enam bagian antara lain: Jenis Penelitian, teknik Pengumpulan Data, teknik menentukan informan, Sumber Data, Lokasi Penelitian, dan Teknik Analisa Data.

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yang mengutamakan pengalaman subjek yang dalam hal ini adalah Novianus YL Patanduk dengan Risfayanti Muin sebagai kader dipecat dan kader yang dipilih untuk mengisi kursi Partai PDI Perjuangan pada Pemilihan Anggota Legislatif tahun 2019.

Jenis penelitian fenomenologi terdiri dari tiga fase, yaitu mengintuisi, menganalisis, dan menjabarkan secara fenomenologis. Mengintuisi berarti mengonsentrasikan secara intens atau merenungkan fenomena. Menganalisis artinya menemukan berbagai unsur atau bagian pokok dari fenomena dan kaitannya antar satu dengan lainnya. Sedangkan menjabarkan adalah menguraikan fenomena yang telah diintuisi dan dianalisis, sehingga fenomena itu bisa dipahami orang lain.

Jenis penelitian fenomenologi bertujuan memahami realitas secara mendalam. Maka metode fenomenologi bertumpu pada aktor politik *(the human perspective),* dan bertumpu pada konstruksi sosial atas realitas *(the* *onstruction of reality)*, yang prosesnya mengandalkan pemahaman *(subjective understanding).* Pemecatan kader terpilih partai PDI

Optimization Software:
www.balesio.com

Perjuangan pada pemilihan anggota legislative tahun 2019 adalah pengalaman subjektif dari aktor tersebut yang merupakan konstruksi terhadap kondisi politik yang sedang berlangsung saat itu.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mempelajari secara intensif terkait bagaimana proses penerimaan partai terhadap calon, serta apa yang melatarbelakangi terjadinya pemecatan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi hasil pemilu serentak 2019 di Sulawesi selatan dari partai PDI-Perjuangan atas nama Novianus Y.L Patanduk, S.E Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui alasan pemecatan calon terpilih dari partai PDIP terhadap Novianus Y.L Patanduk yang kemudian di gantikan oleh Risfayanti.

Dari sisi cakupan wilayah kajiannya, penelitian fenomenologi terkait dinamika partai politik dalam penetapan calon terpilih, pemecatan calon terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh partai PDI-Perjuangan, termasuk alasan pemecatan tersebut, serta pilihan rasional partai politik dalam menetapkan anggota DPRD Partai PDI Perjunagan di daerah pemilihan (dapil) 2 Sulawesi Selatan. Posisi kajian lebih pada perilaku pada tingkat individu, kelompok, lembaga dan organisasi. Kasusnya pun dibatasi pada jenis kasus tertentu yaitu dalam hal ini fokus terhadap analisis a pemecatan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat provinsi hasil pemilu serentak 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan

Optimization Software:
www.balesio.com

dari partai PDI-Perjuangan atas nama Novianus Y.L Patanduk, S.E, di tempat atau lokus dan waktu tertentu yaitu di pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sulawesi selatan Dapil II Partai politik PDI-Perjuangan pemilu serentak 2019.

3.2 Tehnik pengumpulan data

1. *Library research* yaitu cara pengumpulan data dengan melalui penelusuran buku, jurnal, surat kabar atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya.

b. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam bentuk ikhtisarnya.

2. *Field research* yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui empat cara yakni wawancara mendalam *(indepth interview),* rekaman arsip, si langsung, dan dokumentasi.

wancara mendalam

Optimization Software:
www.balesio.com

Wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka *(face to face)*. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara terarah yang lebih terfokus pada persoalan yang menjadi inti penelitian. Isu pokok yang tercakup dalam wawancara ini adalah mengetahui bagaimana proses perekrutan calon dari partai PDI-Perjuangan termasuk alasan pemecatan calon terpilih dari partai PDI-Perjuangan tersebut

Sedangkan wawancara tak terarah dilakukan untuk memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam mengenai pandangan subjek yang diteliti sehingga informan memperoleh kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur oleh peneliti.[24]

b. Rekaman Arsip

Penelitian ini juga menggunakan rekaman arsip sebagai salah satu sumber bukti penelitian Studi kasus, dalam hal ini penelitian terhadap dinamika partai politik dalam penetapan calon terpilih, studi pemecatan calon terpilih DPRD Provinsi oleh partai PDIP di Sulawesi Selatan dengan mengumpulkan rekaman arsip dari wawancara, dan rekaman-rekaman pribadi, seperti buku harian, kalender, dan daftar

---

uyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi karta: Kharisma Putra Utama, 2005).

Optimization Software:
www.balesio.com

nomor, namun di dalam penelitian penulis mengalami kendala dalam mengupulkan dokumen terkait Salinan gugatan Risfayanti terhadap Novianus YL Patanduk terkait permainan suara, karena dokumen tersebut hanya bisa diketahui di internal partai saja.[25]

c. Observasi langsung

Penelitian ini juga melakukan teknik Observasi dan pengamatan langsung yaitu dalam hal ini Peneliti melakukan pengamatan atau observasi awal dan penelitian untuk menyelesaikan proposal thesis ini dengan mendatangi kantor DPD partai PDIP Provinsi Sulawesi Selatan di jalan gunung bawakaraeng

d. Dokumen

Selain tiga teknik pengumpulan data diatas, dokumen juga menjadi elemen penting dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[26] Dokumen terkait berupa foto-foto peneliti dengan ketua partai PDI-Perjuangan, Dewan Pembina partai PDI-Perjuangan baik itu saat melakukan wawancara, maupun observasi, hingga foto-foto yang dianggap penting untuk diabadikan seperti foto, data penetapan calon terpilih hasil pemilu serentak 2019 dari kpu, dan surat administarasi pemecatan dll.

Optimization Software:
www.balesio.com

Yin. 2015. Studi Kasus, Desain & Metode. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta
o Surakhnad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung: Tarsito,
192

3.3 Tehnik Menentukan Informan

Informan adalah subyek/obyek yang menjadi sumber peneliti dalam memperoleh data. Penelitian jenis kualitatif umumnya tidak menggunakan istilah sampel, tetapi “informan.” Penelitian ini menggunakan Teknik penentuan informan yang dikemukakan oleh W. Lawrence Neuman (2007) yaitu; Purposive. Purposive yang dimaksud adalah, dimana peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.

Penelitian kualitatif menempatkan informan sebagai bagian yang penting karena berhubungan dengan data dan kevalidan data tersebut, sehingga dibutuhkan ketepatan dalam pemilihan informan. Kriteria informan kunci menurut Sugiyono (1997:471) ada lima yaitu:

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktif.
2. Subjek yang masih terlibat secara penuh atau aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
3. Subjek yang mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau
emas terlebih dahulu.
bjek yang sebelumnya masih tergolong asing dengan penelitian.

Optimization Software:
www.balesio.com

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* atau sample bertujuan dengan pemilihan *key person* nya juga disesuaikan dengan tujuan penelitian, dalam hal ini tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui alasan pemecatan calon legislative DPRD terpilih hasil pemilu provinsi Sulawesi Selatan dari partai PDIP dan apa keuntungan dan kerugian dari kedua belah pihak dalam permasalahan (pemecatan) ini.

Adapun informan yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Ketua DPD PDIP Provinsi Sulawesi Selatan
2. Dewan kehormatan PDIP
3. Pengurus PDIP Sulawesi selatan
4. Novianus Y.L Patanduk
5. Risfayanti Muin
6. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
7. Calon anggota DPRD provinsi Dapil II yang tidak terpilih

3.4 Sumber data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan yaitu;

1. Data primer

   Data primer yang merupakan data pokok dalam penelitian sangat dibutuhkan oleh peneliti berupa data untuk Data primer yang merupakan data pokok dalam penelitian sangat dibutuhkan oleh peneliti berupa data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data yang

Optimization Software:
www.balesio.com

diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke masyarakat umum untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data penunjang penelitian bagi penulis, dalam penelitian peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di partai PDIP dan KPU Provinsi Sulawesi selatan. tepatnya di kantor Sekretariat DPW partai PDIP provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng no. 210, dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan.

3.6 Tehnik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Menurut Nan Lin (1976) dalam Silalahi (2012:332), analisis data mempunyai dua tujuan yakni meringkas dan menggambarkan *summarize and describe the data)* dan membuat inferensi dari data pulasi darimana sampel ditarik *(to make inferences from the data*

Optimization Software:
www.balesio.com

to the population from which the sample was drawn). Kerlinger datam Silalahi (2012:332) menyatakan analisis berarti kategorisasi, penataan, manipulasi dan peringkatan data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Kegunaan analisis ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.[27]

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah dikumpulkan dalam aneka cara (observasi, wawancara. intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya "diproses" sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan Kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.[28]

Optimization Software:
www.balesio.com

alahi, 2012. Metode Penelitian Sosial, PT. Reflika Aditama. Bandung.
39

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Partai PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) PDIP memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai sejarah Partai PDIP lengkap beserta visi dan misinya, struktur kepengurusannya, dan keikusertaannya dalam Pemilu di Indonesia.

Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada 1927. Kebijakan fusi partai politik pada masa order baru dianggap sebagai awal mula terbentuknya PDIP. Anda dapat membaca sejarah PNI (Partai Nasional Indonesia). Pada 27 Februari 1970, Soeharto mengundang pimpinan lima partai politik, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan Murba. Selanjutnya pada 7 Maret 1970 di ruang kerja Wakil Ketua MPRS M. Siregar, 5 tokoh parpol tersebut kembali bertemu dalam rangka membicarakan pengelompokkan partai.

Pertemuan berlanjut pada 9 Maret 1970 dengan agenda pokok untuk penyelesaian deklarasi atau pernyataan bersama. Pertemuan dengan partai politik dan Presiden Soeharto kembali dilakukan pada 12 970. Setelah melalui proses yang panjang, maka pada 10 Januari kul 24.00 WIB, lima parpol sepakat melebur menjadi satu wadah

Optimization Software:
www.balesio.com

bernama Partai Demokarsi Indonesai (PDI) pada pertemuan di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta. Deklarasi ini ditandatangani oleh wakil kelima partai, yaitu MH Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Beng Mang Rey Say dan FX Wignyosumarsono (Partai Katolik), S. Murbantoko R. J. Pakan dan Achmad Sukarmadidjaja (Partai Murba), dan Drs. M. Sadri (IPKI).

Pertemuan pertama dilaksanakan sesudah fusi, yaitu musyawarah nasional yang digelar pada 20-24 September 1973 di Jakarta. Tidak ada hasil signifikan yang didapat dari pertemuan ini. Keinginan untuk melaksanakan kongres terus tertunda akibat konflik internal yang terus bergejolak. Kongres PDI pun akhirnya bisa digerlar pada 12-13 April 1976. Intervensi pemerintah sangat kuat pada kongres ini, sehingga terpilihanya Sanusi Hardjadinata sebagai Ketua Umum DPP PDI secara aklamasi. Susunan DPP disempurnakan atas kesepakatan antara MH Isnaeni dan Sunawar.

Kongres PDI terus berlanjut hingga Kongres PDI ke-IV, tetapi konflik dan intervensi pemerintah masih terus berlanjut. Soerjadi kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun pada Kongres IV PDI di Medan, kericuhan terjadi dengan adanya demonstrasi yang dipimpin Jacob Nuwa Wea yang mencoba menerobos masuk ke area sidang Kongres. Akhirnya pemerntah mengambil alih melalui Mendagri Yogie S. dan mengusulkan membentuk caretaker. Rapat formatur yang

Optimization Software:
www.balesio.com

dipimpin Latief Pudjosakti (Ketua DPP PDI Jatim) pada tanggal 25-27 Agustus 1993 memutuskan susunan resmi caretaker DPP PDI.

Kegagalan Kongres IV PDI di Medan, memunculkan nama Megawatai Soekarnoputri yang didukung warga PDI untuk menjadi ketua umum karena dianggap sanggup menjadi tokoh pemersatu PDI. Pemerintah merasa khawatir dengan fenomenan tersebut. Pemerintah mengadang langkah Megawati dengan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Namun hasil yang diperoleh adalah sebaliknya, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi. Megawati pun dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI.

Konflik internal PDI tetap terjadi setelah berakhirnya Munas. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle yang tidak diakui pemerintah, tetapi aktivitasnya tidak pernah dilarang. Kelompok Soerjadi pun sangat gencar mencari dukungan ke daerah-daerah untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Sebanyak 16 orang anggota DPP PDI dari 28 pengurus berhasil dirangkul untuk menggelar Kongres. Kongres ini mengalami penentangan, kelompok Fatimah Achmad yang

Optimization Software:
www.balesio.com

mendapatkan dukungan pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan penjagaan sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan kendaraan panser. Warga PDI yang setia mendukung Megawati berunjuk rasa besar-besaran pada 20 Juni 1996 dan berakhir bentrok dengan aparat.

Peristiwa ini dikenal dengan Peristiwa Gambir Berdarah. Masa pendukung Megawati menolak keras hasil Kongres Medan, tetapi pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI Kongres Medan yang dipimpin Soerjadi (Ketua Umum) dan Buttu Hutapea (Sekretaris Jenderal) pada 25 Juli 1996. Posisi Megawati pun semakin terpojok.Akhirnya pada 27 Juli 1996, masa pendukung Megawati menggelar Mimbar Demokrasi di halaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Kantor DPP PDI didatangi ratusan orang berkaos merah yang bertujuan mengambil alih kantor DPP PDI.

Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dari Peristiwa 27 Juli yang menelan banyak korban jiwa.Setelah peristiwa tersebut, Megawati beserta pengikut setianya tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan di bawah pantauan pemerintah. Megawati pun menyatakan bahwa PDI di bawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi tetap mengikuti Pemilu amun hasil Pemilu menunjukkan kuatnya dukungan warga PDI

Optimization Software:
www.balesio.com

kepada Megawati, karena suara PDI merosot tajam sehingga hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.

Peristiwa reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI Megawati. Setelah lengsernya Soeharto, kepimpinan Megawati semakin kuat dan PDI di bawah kepemimpinannya semakin berkibar. Tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI Meagawati menyelengarrakan Kongres V PDI di Denpasar, Bali. Megawati pun terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Pemerintah masih tetap mengakui PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Megawati pun mengubah nama PDI menjadi PDI perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 supaya dapat mengikuti Pemilu 1999. Nama ini disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.

PDI Perjuangan melaksanakan Kongres I pada 27 Maret – 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Megawati ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan. Hingga saat ini, kendali PDI Perjuangan tidak pernah terlepas dari peran Megawati. Pada Kongres IV PDI Perjuangan di Bali tanggal 8-12 April 2015, sosok Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020

Optimization Software:
www.balesio.com

4.2 Visi Partai PDI Perjuangan

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan Partai adalah:

1. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
3. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Misi Partai PDIP

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, mana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar aitu :

Optimization Software:
www.balesio.com

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

1. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
2. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

1. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
2. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
3. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
4. g mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat ewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Optimization Software:
www.balesio.com

Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan

5. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

1. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
3. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
6. ngun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan k, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pasal 10 Partai mempunyai tugas:

1. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
3. menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
5. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;

poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam
lupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan

Optimization Software:
www.balesio.com

solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

Struktur Kepengurusan PDIP

Susunan DPP PDI Perjuangan untuk masa kerja 2015-2020 hasil Koongres IV di Bali adalah:

- Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
- Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
- Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono
- Ideologi dan Kaderisasi: Idham Samawi
- Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Syaiful Hidayat
- Politik dan Keamanan: Puan Maharani (Non-Aktif)
- Hukum HAM & Perundangan: Trimedya Pandjaitan
- Bidang Perekonomian: Hendrawan Supratikno
- Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Muhammad Prakosa
- Kemaritiman: Rohmin Dahuri
- Pemb. Manusia & Kebudayaan: Andreas Hugo Pareira
- Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning
- Buruh Tani dan Nelayan: Mindo Sianipar
- an dan Anak: Sri Rahayu
- an dan Kebudayaan: I Made Urip

Optimization Software:
www.balesio.com

- Koperasi dan UMKM: Nusirwan Sujono
- Pariwisata: Wiranti Sukamdani
- Pemuda dan Olahraga: Sukur Nababan
- Keagamaan dan Kepercayaan: Hamka Haq
- Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo
- Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
- Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey
- Wabendum Internal: Rudiyanto Chen
- Wabendum Program: Yuliari Peter Batubara
- Wasekjen Bidang Internal: Utut Adianto
- Wasekjen BIdang Kerakyatan: Erico Sotarduga
- Wasekjen BIdang Pemerintahan: Ahmad Basarah

Partisipasi PDIP Pada Pemilu di Indonesia

1. Pemilu 1999

   Sejarah pemilu di indonesia menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang Pemilu 1999 dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih dalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4.

Optimization Software:
www.balesio.com

2. Pemilu 2004

PDI-P medapat 109 kursi di Pemilu 2004. PDI-P menempati posisis ke-2 setelah mendapatkan suara sebanyak 21.026.629 suara.

3. Pemilu 2009

Pada Pemilu 2009, PDI-P mendapat posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR. PDI-P mendapat 95 kursi (16,96%) di DPR dari hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009.

4. Pemilu 2014

PDI-P berhasil mendapat 109 kursi di DPR dan menempati posisi pertama. Pada Pemilu 2014 ini pun, PDI-P berhasil mengantarkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

5. Pemilu 2019

Pada Pemilu 2019 mendatang PDI-P akan kembali berpartisipasi. Partai ini mengusung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Inilah penjelasan mengenai sejarah Partai PDI-P. Semoga Anda dapat ambil manfaat dari sejarah pendirian partai ini. Semoga bermanfaat.

Optimization Software:
www.balesio.com

4.3. Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2014, 2014-2019,2019-2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (disingkat **DPRD Sulawesi Selatan** atau **DPRD Sulsel**) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. DPRD Sulawesi Selatan beranggotakan 85 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Selatan dalam dua periode terakhir.

4.3.1 Priode 2019-2024

Tabel 1.1 Perolehan Kursi DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2019-2024

Partai Politik	2019-2024
PKB	▲ 8

Optimization Software:
www.balesio.com

Gerindra	– 11
PDI Perjuangan	▲ 8
Golkar	▼ 13
NasDem	▲ 12
PKS	▲ 8
PPP	▼ 6
PAN	▼ 7
Hanura	▼ 1
Demokrat	▼ 10
	▼ 0

Optimization Software:
www.balesio.com

PKPI	▼ 0
Perindo	(baru) 1
Jumlah Anggota	**– 85**
Jumlah Partai	**▼ 11**

2.3.2 Periode 2014-2019

DPRD Sulawesi Selatan periode 2014-2019 terdiri dari 10 fraksi sebagai berikut.

Tabel 1.2 Perolehan Kursi DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2014- 2019

Nama Fraksi	Partai Politik	Jumlah Anggota
Golkar	Golkar	18
Gerindra	Gerindra	11
...at	Demokrat	11

Optimization Software:
www.balesio.com

PAN		9
NasDem	NasDem	7
PPP		7
PKS	PKS	6
Hanura	Hanura	6
PDI Perjuangan	PDI Perjuangan	5
Ummat Bersatu	PKB PBB PKPI	5

Optimization Software:
www.balesio.com

Tabel 1.3 Perolehan Kursi DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014

Nama Fraksi	Partai Politik	Jumlah Anggota
Golkar	Golkar	18
Demokrat	Demokrat	10
PAN	PAN	7
PKS	PKS	7
Hanura	Hanura	7
PDK	PDK	7
PPP	PPP	5
PKPI-PDS-RepublikaN-Gerindra	PKPI PDS	6

Optimization Software:
www.balesio.com

	RepublikaN Gerindra	
PBB-PBR-PKB-PPDI-PDIP	PBB PKB PBR PPDI PDI Perjuangan	8

4.4 Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Sulawesi Selatan sejak awal berdirinya.

Optimization Software:
www.balesio.com

Tabel 1.4 Daftar Ketua DPRD Sulawesi Selatan

No. Urut	Ketua	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Periode DPRD	Wakil Ketua	Ket
1	Kamaruddin Lili	1966	1967	1966-1971	*tidak diketahui*	
2	R. Dg. Mangambung	1967	1971			
		1971	1972	1971-1977	*tidak diketahui*	
3	A.R. Madjid	1972	1977			
4	Abdul Latief	1977	1982	1977-1982	*tidak diketahui*	
5	M. Arsyad B.	1982	1987	1982-1987	*tidak diketahui*	
6	B. Mappangara	1987	1992	1987-1992	*tidak diketahui*	
		1992	1995	1992-1997	*tidak diketahui*	
7	Alim Bachrie	1995	1997			
8	M. Amin Syam	1997	1999	1997-1999	*tidak diketahui*	

Optimization Software:
www.balesio.com

		1999	2003	1999-2004	*tidak diketahui*	
9	Eddy Baramuli	2003	2004			
10	Agus Arifin Nu'mang	2004	2008	2004-2009	*tidak diketahui*	
11	Mohammad Roem	2008	2009			
		2009	2014	2009-2014	*tidak diketahui*	
		24 September 2014	21 Oktober 2014	2014-2019	*Ni'matullah*	Pimpinan sementara.[
		21 Oktober 2014	24 September 2019		Ni'matullah Yusran Sofyan Ashabul Kahfi Andi Rahmatika Dewi	[15]
	Ina Kartika Sari	24 Septe	21 Oktober 2019	2019-2024	*Syaharuddin Alrif*	Pimpinan sem

Optimization Software:
www.balesio.com

		mber 2019				enta ra.
		21 Oktober 2019	*petahana*		Syaharuddin Alrif Darmawangsyah Muin Ni'matullah Muzayyin Arif	

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat gagasan atau pemikiran peneliti yang terkait dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah diamati pada saat penelitian. Dipaparkan, dianalisis serta diuraikan dalam bentuk tulisan yang dikaitkan dengan hasil kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan membahas tentang pemecatan calon anggota legislative terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD Partai PDI Perjuangan Tahun 2019, yakni tentang alasan pemecatan kader terpilih Novianus pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2019. Pada bab ini penulis juga menguraikan keuntungan dan kerugian setelah melakukan pemecatan kader terpilih.

5.1 Faktor Pemecatan calon legislative terpilih DPRD hasil pemilu provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD partai PDI Perjuangan

Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki peran penting, yaitu mencari dan mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin nasional. Untuk melaksanakan peran tersebut, partai politik dituntut memiliki proses rekrutmen dan kaderisasi yang baik, serta memiliki tahapan yang terstruktur agar menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan kredibel. Rekrutmen dan kaderisasi politik ini mencakup pemilihan, seleksi dan ngkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah

Optimization Software:
www.balesio.com

peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Proses rekrutmen dan kaderisasi dalam demokrasi, sebagai bentuk persiapan partai politik dalam mempersiapkan kader terbaik untuk menduduki suatu jabatan politik, Kualitas kader dalam suatu partai politik menentukan daya jual partai politik di masyarakat, dan tingkat kepercayaan partai politik terhadap masyarakat akan semakin meningkat begitupun dengan sebaliknya. Salah satu fenomena yang terjadi pada pemilihan calon anggota legislatif Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 daerah pemilihan 2 yang meliputi: Kecamatan Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, dan Biringkanaya terjadi pemecatan kader terpilih yaitu Novianus sebagai peraih suara terbanyak di fraksi PDI Perjuangan digantikan oleh Risfayanti. Berikut akan dipaparkan factor-faktor pemecatan calon legislative terpilih DPRD hasil pemilu provinsi Sulawesi Selatan tahun oleh DPD partai PDI Perjuangan.

5.1.1 Partisipasi Dana Gotong Royong

Pembiayaan dana gotong royong yang dipersyaratkan seluruh anggota frasksi PDI Perjuangan dalam upaya pemenangan pemilihan calon anggota legilatif 2019, dana yang dikumpulkan dipergunakan untuk pembayaran saksi untuk mengawal suara mulai dari pemungutan suara di lai hasil perhitungan sampai pada penetapan hasil. Setiap partai emiliki anggaran dasar rumah tangga (ADRT) yang merupakan

Optimization Software:
www.balesio.com

konstitusi partai yang harus dujalankan dan diperjuangkan oleh seluruh kader partai di semua tingkatan.

Upaya menggalang dana gotong royong untuk semua fraksi PDI Perjuangan dengan tujuan membiayai seluruh kebutuhan partai dalam memenangkan pemilihan anggota legislatif tahun 2019. Namun yang menjadi persolan Ketika kader partai melakukan pelanggaran dengan tidak mematuhi aturan partai bisa saja dilakukan pemecatan sebagai anggota.

Salah satu kader partai PDI Perjuangan mengalami pemecatan setelah terpilih menjadi Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Selatan Adalah Novianus, Novianus masuk di daerah pemilihan (Dapil) 2 Sulawesi Selatan mewakili partainya mendapatkan satu kursi. secara perolehan suara mendapatkan suara tertinggi di Partai PDI Perjuangan namun harus gagal untuk dilantik karena melanggar Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai PDIP Perjuangan. Hal Ini dibenarkan Oleh Andi Ridwan Wittiri Ketua Fraksi PDIP Sulawesi Selatan, berikut Kutipan wawancara penulis dengan Informan:

> "Memang benar bahwa, pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2019, salah satu kader partai kami yang mengalami pemecatan adalah Novianus, alasan dari partai bahwa salah satu anggaran dasar rumah tangga dari partai kami adalah membayar uang gotong royong, dan dana tersebut dipergunakan untuk membayar uang saksi agar perolehan suara biasa terkawal dengan baik mulai pemungutan sampai pada hasil penetapan hasil pemilu".[29]

[29] wan Wittiri, Wawancara dilakukan, di Rumah Pemenangan PDI Perjuangan yang di Jl. Urip Sumoharjo. Tgl 5/5/2020.

Optimization Software:
www.balesio.com

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat partai PDI Perjuangan secara kelembangaan memiliki regulasi diinternal partai terkait sistem rekrutmen , artinya bahwa setiap kader harus patuh dan mematuhi aturan partai, termasuk dengan kewajiban kader untuk memberikan dana gotong royong ke fraksi,dengan tujuan pembuatan atribut kampanye dan pelaksaanan kampanye umum, melihat pemilihan calon anggota legislative tahun 2019 berbeda dengan pemilihan calon anggota legislative sebelumnya yang dirangkaiankan dengan pemilihan Presiden dengan wakil presiden, sehingga segala bentuk aktivitas partai itu dibayarkan melalui dana gotong royong.

Besarnya biaya politik di setiap pemilu memaksakan kader partai harus membayarkan dana ke partai politik, sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta pemilu harus menyiapkan dana untuk maju menjadi calon anggota legislatif, kepala daerah, maupun Presiden. Salah satu pendanaan yang besar harus dikeluarkan partai adalah pembayaran uang saksi maka dari itu partai PDI Perjuangan mengambil langkah bahwa salah satu cara untuk memenangkan kontestasi politik adalah saksi di lapangan harus kuat. Sehingga pimpinan partai harus mempersyaratkan dana gotong royong ke masing masing kader. Meski pada dasarnya wacana permohonan semua fraksi untuk meminta ke KPU sebagai penyelenggara negara dana saksi melalui APBN akan tetapi dari fraksi PDI Perjuangan melakukan an terhadap rancangan itu. Hal ini juga dibenarkan oleh Husain

Optimization Software:
www.balesio.com

Junaid Ketua Pemenangan DPD Partai PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, berikut kutipan wawancara penulis dengan Informan:

> " Perlu kami sampaikan awal mula masalah ini terkait dengan proses internal PDI Perjuangan. Dimana PDI Perjuangan dalam menghadapi pemilu seluruh kader diminta untuk bergotong royong, dan itu menjadi keputusan partai dan semua kader harus patuh dengan itu, menindak lanjuti laporan dari sekertariat ada caleg yang tidak melaksanakan kewajiban. Meski sudah dari awal kami sudah menyurati seluruh caleg Provinsi dan kabupaten Kota untuk memabayar dana gotong royong untuk berpartisipasi dalam hal pembiayaan saksi.[30]

Berdsarkan pernyataan informan di atas berkaitan dengan surat DPD PDI Perjuangan nomor: 1238/IN/DPD-SS/II/2019 perihal PENEGASAN berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan tanggal 10 januari 2019 dan berdasarkan hasil keputusan Rapat Koordinasi Daerah DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan perihal Gotong Royong Dana saksi Pileg 2019 sehingga DPD PDI Perjuangan Menegaskan kepada Calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa sangat urgennya Saksi Partai Politik dalam memenangkan dan mengamankan suara Pileg 2019 maka diharapkan segera menyetorkan Dana Gotong Royong Saksi Sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada DPD partai paling lambat 7 Maret 2019 dan jika tidak melaksanakan dianggap tidak melaksanakan partisipasi Gotong royong

---

unaid. Wawancara Dilakukan Di Kantor Pemenangan PDI Perjungan Tanggal

Optimization Software:
www.balesio.com

dana saksi Pileg 2019 dan akan dilaporkan hal tersebut kepada DPP Partai PDI Perjuangan dan dana tersebut di setorkan langsung ke Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang diamanahkan ke An.Sdr(i) Risfayanti Muin,SS

Surat penyampaian yang dikeluarkan oleh DPD PDI Perjuangan untuk disampaikan kepada kader partai untuk membayarkan dana gotong royong kepada partai hal ini berdasarkan hasil keputusan rapat kordinasinasi Nasional (Rakornas) dan hasil pleno Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD partai akan segera merekrut saksi pemilihan calon legislative yang akan dibiayai secara gotong royong oleh masing-masing kader. surat penyampaian yang dilakukan DPD partai tanggal 19 Januari PDI 2019 dan tanggal 15 Februari 2019 mengingatkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan dan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) serta memperhatikan surat DPD 1234, setelah itu surat penyampaian ke tiga dikeluarkan per tanggal 7 Maret untuk penegasan dana saksi kepala calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sebagai batas waktu pengumpulan.

Berdasarkan hasil laporan sekertariat data lapangan yang penulis temukan bahwa sebanyak 3 kali persuratan yang dilayangkan kepada Novianus Y.L. Patanduk akan tetapi tidak ada respon dari pihak terkait, ebelum dikeluarkan surat dari DPD Novianus T.L Patanduk berjanji mbayarkan uang saksi. Sampai pada proses pemilu dana tersebut bayarkan, sampai proses pemilu selesai dana kampaye diantarkan

Optimization Software:
www.balesio.com

oleh keluarga novianus namun dana tersebut ditolak karena distribusi dana saksi sudah tersalurkan. Penolak tersebut dibenarkan oleh Novianus T.L Patanduk Mantan Kader PDI Perjuangan, berikut kutipan wawancara penulis dengan Informan:

> " sebelum surat keputusan tersebut keluar, di PDI Perjuangan ada surat intruksi terkait dan dana Gotong Royong saksi pemilu sebesar 20 juta rupiah per orang dan itu sekitar tanggal 27 maret sebagai batas pembayaran dana saksi, alasan saya tidak membayar tepat waktu, karena saya maju dengan keterbatasan dana, dan saya berkomitmen dulu berjuang untuk mendapatkan hasil pemilu. Namun setelah itu saya ,mendapatkan beberapa masukan dana dari teman sebanyak Rp. 8.000.000 dan langsung membawa ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan namun ditolak dengan alasan sudah melewati batas waktu karena saya membawanya pada tanggal 26 april 2019.[31]

Berbagai upaya yang dilakukan Novianus T.L Patanduk untuk memperjuangkan kontituen yang memilihnya pada pemilihan calon anggota Legislatif tahun 2019, termasuk mempertanyakan surat pemecatan yang dilakukan terhadap dirinya. Tindakan yang dilakukan dengan bersurat ke Mahkamah partai PDI Perjuangan, Ke kementrian Dalam Negeri dengan tembusan dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, namun tidak mendapatkan balasan dari surat tersebut. Pada dasarnya Novianus T.L Patanduk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan, yaitu dengan tidak membayarkan uang saksi yang dipersyaratkan. Namun kondisi keuangan s pada saat pendaftaran tidak mampu memenuhi aturan partai. Dan

s YL Patanduk.

Optimization Software:
www.balesio.com

sudah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) partai PDI Perjuangan terkait kedisplinan dan larangan anggota partai. Berikut Anggaran Dasar Rumah Tangga PDI Perjuangan yang tertuang dalam pasal 21, 22, 23, 24:

Pasal 21

(1) Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai.

(2) Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 22

Anggota Partai dilarang:

a. menjadi anggota organisasi politik lainnya;

b. melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai;

c. melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;

d. mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;

e. membocorkan rahasia Partai;

f. menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan ari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat

Optimization Software:
www.balesio.com

merugikan citra Partai; g. melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Partai; dan

h. melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-Peraturan Partai

Pasal 23

(1) Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa:

a. peringatan;

b. pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;

c. pembebas tugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan

d. pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan sanksi kepada Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai

Optimization Software:
www.balesio.com

(1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.

(2) Anggota Partai yang menolak pemberhentian/ pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat: a. mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau b. mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai. Pasal 25 Bagi Anggota Partai yang ditugaskan oleh Partai di jabatan politik dan jabatan publik di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang dikenakan sanksi pemberhentian/pemecatan dari keanggotaan Partai, maka Partai secara tertulis memberitahukan kepada lembaga politik dan lembaga publik tempat bersangkutan ditugaskan.[32]

Berdasarkan aturan yang dituangkan dalam anggran dasar rumah tangga partai (ADRT) PDI Perjuangan Sudah jelas digambarkan bahwa kedisiplinan partai sudah diatur pada pasal 21 pada poin ke dua yaitu pelanggaran disipin partai dikenakan sanksi oleh partai serta Novianus T.L Patanduk tidak mematuhi pasal 22 terkait larangan anggota partai, pada poin ke empat sudah dijlaskan setiap anggota partai yang mengabaikan an tanggung jawab yang telah diberikan oleh partai dan sudah

n Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai PDI Perjuangan. Hal. ….

Optimization Software:
www.balesio.com

dijelaskan dalam pasal 11 terkait penetapan sanksi yaitu menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin partai, melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam anggran dasar rumah tangga (ADRT) partai dibuat secara tertulis nama jabatan dan jenis pelanggaran yang bersangkutan serta jangka waktu berlakunya sanksi.

Melihat kondisi yang dialami Novianus T.L Patanduk, kewenangan partai politik yang terlalu besar, sehingga diperlukan Undang-Undang partai politik yang bukan terkait dengan Undang-Undang Pemilu, melainkan adanya mekanisme yang berkaitan dengan bagaimana proses pemecatan, pemberhentian keanggotaan yang diberlakukan oleh seluruh partai politik. Jadi ada mekanisme yang memberikan kepastian untuk semua kader partai politik. Meski pada dasarnya Undang-Undang partai politik memang telah memuat aturan soal pemecatan anggotanya, akan tetapi aturan yang ada saat ini belum mampu menjawab dugaan-dugaan atau tuduhan yang dilayangkan oleh partai politik, jika ada anggotanya dipecat. Apa lagi jika pemecatan anggota partai itu bakal berpengaruh pada status mereka sebagai calon anggota legislatif terpilih. Yang akibatnya adanya pergantian caleg terpilih sebelum pelantikan anggota legislatif.

Berangkat dari kasus pergantian calon anggota legislatif terpilih DI Perjuangan yang berdasarkan acuan pada ketentuan yang ada nurut Undang-Undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi n juga peraturan KPU, penulis melihat adanya kekeliruan dalam

Optimization Software:
www.balesio.com

pergantian ini, bahwa seharusnya caleg yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak di pemilu, partai politik tidak berwewenang mengganti dan menentukan siapa caleg yang melenggang di DPR maupu di tingkat DPRD kalaupun melakukan pelanggaran seharusnya dilakukan pelantikan terlebih dahulu sebagai bentuk menghargai hasil demokrasi. Pergantian calon anggota legislatif terpilih partai PDI Perjuangan dibenarkan oleh Andi Ansyari Mangkona Ketua DPD Bidang Kehormatan Partai PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, berikut kutipan wawancara penulis dengan informan:

> "Hasil perolehan suara Novianus T.L Patanduk pada pemilihan legislative tahun 2019 kader PDIP yang terpilih menjadi anggota dewan dengan perolehan suara 4.305. Novianus gagal dilantik karena melakukan pelanggaran kode etik partai politik. surat dari DPP Partai PDIP untuk surat penecatan Novianus Patanduk telah disampaikan Gubernur Sulsel untuk diteruskan ke Kemendagri, dan bahkan suratnya telah ke KPU. Tak hanya itu Novianus dipecat dan bakal digantikan oleh Risfayanti Muin.Risfayanti merupakan Caleg PDIP dari Dapil yang sama dengan Novianus Patanduk dan juga berselisih 48 suara saja. Dimana Risfayani meraih suara 4.257 suara".[33]

Kasus pergantian calon terpilih di partai PDI Perjuangan menjadi contoh bagaimana aturan main yang sudah ada disesuaikan' dengan kepentingan partai politik, Celah yang ada dalam peraturan digunakan partai politik dengan perubahan penerapan sistem proporsional tertutup proporsional terbuka, ada semangat untuk meningkatkan

yari Mangkona.Wawancara Dilakukan Dikantor DPD Partai PDI Perjuangan.

Optimization Software:
www.balesio.com

partisipasi politik sehingga pemilih bisa langsung memilih calon anggota yang ditemukan dalam surat suara, bukan lagi memilih partai politik. Semangat ini mestinya diikuti oleh reformasi kelembagaan partai politik, secara normatif sistem yang ada sudah sangat maju namun perilaku partai politik masih tertinggal, seolah kuasa partai politik sangat besar.

Proses pemecatan kader menjadi urusan internal setiap partai politik (parpol). Parpol mempunyai mekanisme sendiri untuk menentukan keputusan untuk memecat kadernya, menurut Analisa penulis bahwa pemecatan anggota kader partai sudah menjadi sebuah fenomena, beberapa kasus yang terjadi partai politik melakukan pemecatan terhadap kadernya, selain dari kasus Novianus YL Patanduk juga dialami oleh kader partai Gerindra yaitu Misriyani Ilyas . pada dasarnya partai politik memiliki kewenangan tersendiri dalam melakukan pemecatan terhadap kadernya akan tetapi parpol hingga saat ini tidak memiliki standard jelas. Ini yang tidak bisa jadi pengetahuan publik sehingga bisa menilai wajar atau tidak seorang anggota kader dipecat dari posisinya. Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disebutkan bahwa partai politik memiliki hak untuk memecat anggotanya yang bertentangan dengan kebijakan partai selama ini ada banyak faktor pemecatan yang sulit dijelaskan ke publik secara gamblang.

emecatan kepada Novianus YL Patanduk, dengan melalui
i proses yang dilakukan oleh internal partai PDI Perjuangan, mulai
pemanggilan, pemanggilan dilakukan kepada Novinaus YL

Optimization Software:
www.balesio.com

Patanduk sebagai bentuk tindak lanjut atas adanya laporan dari Risfayanti Muin terkait pelanggaran yang dilakun sehingga diperlukan peninjauan Kembali untuk menetapkan terlapor sebagai peraih kursi di daerah pemilihan (dapil) II Sulawesi Selatan dan harus dibawah ke mahkama partai untuk dimintai pertimbangan dan dilakukan putuskan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP). Bentuk persuasif juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memfasilitasi pihak yang terlapor dan pelapor . mediasi pun juga telah dilakukan oleh mahkamah partai namun tidak menemukan kesepakatan, sehingga gugatan yang dilaporkan Risfayanti dikabulkan oleh Mahkamah partai dan dilakukan pemecatan terhadap kader terpilih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Sehubungan dengan hal tersebut sehingga DPP partai PDI Perjuangan mengistruksikan kepada DPD, DPC dan para Calon Anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PDI Perjuangan seluruh Indonesia apabila ada dugaan pelanggaean sengketa hasil pemilu Legislatif Internal Partai untuk melakukan pengajuan laporan yang disampaikan secara tertulis kepada Tim Penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilu legislatif 2019 internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TIDAK DIPERBOEHKAN untuk melaporkan pelanggaran maupun sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif internal partai kepada Eksternal partai.

pabila ada caleg yang melaporkannya ke eksternal Partai, maka tai akan mempertimbangkan kembali pencalegkannya. Pengajuan

Optimization Software:
www.balesio.com

laporan dugaan pelanggaran sengketa pemilu legislatif 2019 internal partai dilakukan berdasarkan pada peraturan partai. Dan instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader Partai dan istruksi ini berlaku secara nasional.

5.1.2 Pelanggaran Dalam Penetapan Suara

Setiap pemilihan umum memiliki metode yang panjang, mulai dari penentuan calon peserta, hari pemungutan suara, sampai pada penentuan pemenang pemilu. Pada pemilu tahun 2019 dengan system pemilu proporsional terbuka merupakan hal yang sama dilakukan pada pemilu tahun 2014 akan tetapi dari segi perhitungan suara yang berbeda jika pemilu tahun 2014 menggunakan perhitngan suara dengan metode quota share sedangkan pada pemilu 2019 menggunakan metode perhitungan bernama Sainte League. Berbeda dengan kuota share metode saint league tidak menetapkan harga suara yang dibutuhkan dalam satu kursi akan tetapi pemenang akan ditentukan menggunakan bilangan pembagi ganjil atau total suara sah partai politik akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil. Berikut hasil perolehan kursi di daerah pemilihan (dapil) 2 Sulawesi Selatan Makassar B:

Optimization Software:
www.balesio.com

Tabel 1.5 Perolehan Kursi Partai Daerah Pemiliahan II Sulawesi Selatan

No.	Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Dapil Sulsel 2
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
2	2	Partai Gerindra	1
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
4	4	Partai Golongan Karya	1
5	5	Partai NasDem	1
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7	7	Partai Berkarya	0
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	1
9	9	Partai Persatuan Indonesia	0
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	0
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	
12	12	Partai Amanat Nasional	0
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat	
14	14	Partai Demokrat	1
15	19	Partai Bulan Bintang	0
16	20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	0
		Jumlah Seluruh Perolehan Kursi	**6**[34]

vinsi Sulawesi Selatan, Rekapitulasi Jumlah perolehan Kursi DPRD Provinsi Sulawesi

Optimization Software:
www.balesio.com

Berdasarkan sebaran kursi di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 Makassar B Kecamatan Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, dan Biringkanaya sebaran kursi ada 6 partai yang memperoleh kursi yaitu partai Golkar, Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Gerindra. 6 kursi yang tebagi kemudian diperebutkan diinternal partai masing-masing, dan berikut nama calon legislatif yang memperoh suara tertinggi:

Tabel 1.6 Perolehan Suara Partai Dan Caleg Terpilih Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan

DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI SELATAN 2 MAKASSAR B)					
PROVINSI : SULAWESI SELATAN					
NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	PARTAI GERINDRA	3	MISRIANI ILYAS, S.P., M.Si.	10.057	1
2	PDI PERJUANGAN	5	NOVIANUS Y.L. PATANDUK, S.E.	4.305	1
3	PARTAI GOLKAR	5	RAHMAN PINA, S.I.P., M.Si.	15.115	1
	artai asDem	5	REZKI MULFIATI LUTFI	15.644	1

Optimization Software:
www.balesio.com

5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	Hj. HASLINDA, S.Sos., M.Si.	10.778	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	HAIDAR MADJID	10.652	1

Berdasarkan tabel di atas dari total kursi yang diperebutkan yaitu 6 kursi untuk daerah pemilihan 2 Sulawesi Selatan partai PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi yaitu Novianus YL Patanduk meski secara perolehan suara Novianus memiliki pemilih paling kecil yaitu 4.305 suara dari total 21.997 suara PDIP Sulsel di Pileg 2019 namun secara pelohan suara partai mendapatkan 1 kursi dari total akumulasi dukungan partai melalui metode perhitungan Saint league. Hal ini dibenarkan oleh Novianus YL Patanduk calon anggota Legislatif terpilih daerah pemilihan 2 Sulsel, berikut kutipan wawancara penulis dengan informan:

> ”Berdasarkan hasil perhitungan suara sah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan bahwa partai PDI Perjuangan mendapatkan 1 jatah kursi di daerah pemilihan (Dapil) 2 Sulawesi Selatan dengan total suarah sah 21.997 dari total suara partai saya menadaptkan suara tertinggi dari seluruh calon anggota legislatif partai PDI Perjuangan namun saya dituding melakukan kecurangan menggelembungkan suara akan tetapi hal itu saya tidak lakukan”. [35]

Perolehan suara Novianus YL Patanduk terbesar dari total suara di Partai PDI Perjuangan Perolehan 1 kursi terakhir oleh partai PDI Perjuangan dimenangkan oleh saudara Novianus YL Patanduk karena

s YL Patanduk Wawancara dilakukan Di

Optimization Software:
www.balesio.com

mendapatkan suara terting di internal partai yaitu sebesar 4. 305, yang disusul oleh Risfayanti Muin sebesar 4. 257, ketiga Dr. H.A Mawangf Batara 3. 595, terbesar keempat Syamsuddin 3.504, kelima Fitzgeral Lintin 1.667 dan yang terakhir Ika Retno Andini 314 suara Secara perolehan suara Novianus berhak dilantik dan duduk di kursi DPRD Sulawesi Selatan

Tudingan yang tuduhkan oleh Rismayanti kepada Novianus YL Patanduk melakukan kecurangan pada saat pemilu dengan melakukan penggelembungan Suara. Melalui pernyataan Naovianus di depan persidangan Mahkamah Partai PDI Perjuangan membantah segala tuduhan, suara yang didapatkan murni karena perjuangan pribadi dan simpatisan pemilih. Prolehan suara 4.305 merupakan hasil sosialisasi melaui door to door ke rumah-rumah warga, dengan memiliki target perhari 8 rumah. Dari hasil c1 Situng KPU berbeda dengan yang disangkakan oleh Rismayanti. Namun hal ini dibantah oleh Husain Junaid Kabid Pemenangan Pemilu partai PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan: berikut kutipan wawancara penulis dengan informan:

> “Alasan saudara Novianus YL Patanduk dilakukan pemecatan karena adanya pelanggaran yang dilakukan terkaid tidak membayarkannya uang saksi yang dipersyaratkan, selain dari itu: ada masalah lain terkait pelanggaran yang dilakukan suara yang diperoleh secara curang , namun di dalam partai kami memiliki aturan, bahwa segala hal yang bersangkutan dengan senegketa pemilu harus diselesaikan diinternal partai, dan kader tidak boleh elaporkan diluar ekternal partai”.[36]

unaid. Kabid Pemenangan Pemilu partai PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi

Optimization Software:
www.balesio.com

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihaI bahwa, sengketa yang terjadi antara Novianus YL Patanduk dengan Risfayanti Muin merupakan hasil sengketa yang terjadi di internal partai, sehingga segala bentuk penyelesaian dan mediasi diselesaikan di internal partai, sehingga yang menjadi persoalan, Ketika pihak terlapor atau pelapor tidak menemukan suatu titik permasalahan tidak ada lagi putusan tertinggi kecuali di mahkamah partai karena adanya larangan untuk dibawa keluar di ekternal partai. Sangkahan yang dituduhkan oleh Novianus YL patanduk terus dilakukan namun tetap saja partai politik melakukan pemecatan terhadap terlapor, sehingga penulis melihat adanya kelemahan di internal partai dalah hal penyelesaian sengketa. Hal ini penulis bisa gambarkan terkait hasil perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada pemilhan anggota legislative tahun 2019.

Tabel 1.7 Hasil Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan Pada Pemilihan anggota Legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Sulsel.

PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN CALON DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 2		
NO.	**PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON**	**PEROLEHAN SUARA**
3	***Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan***	***4,354***
1	Dr. H. A. MAWANG BATARA SOLI, S.Hut., M.Si.	3,595
	FITZGERALD LINTIN	1,667
	RISFAYANTI MUIN, S.S.	4,257
	SYAMSUDDIN, S.E.	3,504

Optimization Software:
www.balesio.com

5	NOVIANUS Y.L. PATANDUK, S.E.	4,305
6	IKA RETNO ANDINI KAHAR	314
JUMLAH		**21,996**

Berdasarkan tabel di atas, dari total suara 21.996 ada 2 calon anggota legislatif yang memiliki perolehan suara terbesar yaitu Novianus Y.L Patanduk sebesar 4.305 dan Risfayanti 4. 257 suara, selisi perolehan suara keduanya hanya terpaut 48 suara, perbedaan selisih yang tipis memicu sengketa pemilihan anggota legislatif di internal partai PDI Perjuangan. Permohonan gugatan yang dilayangkan Risfayanti untuk melaporkan Novianus diterima oleh mahkah partai, sehingga bentuk proses penetapan calon legislatif terpilih dari fraksi PDI Perjuangan dilakukan oleh penundaan KPU Provinsi, dengan alasan menunggu hasil putusan partai.

Berbagai upaya yang dilakukan Novianus Y.L untuk mengembalikan keanggoyaa sebagai kader partai PDI Perjuangan dengan melakukan persuratan dan permohonan namun putusan mahkama partai tidak mengabulkan permohan pemohon. Menindak lanjuti surat keputusan partai PDI Perjuangan KPU Provinsi Sulawesi Selatan mempersiapkan calon anggota legislatif pengganti yaitu Risfayanti, hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatam Faisal Amir berikut kutipan wawancara dengan informan:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan memutuskan penggantian dua caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang gagal

Optimization Software:
www.balesio.com

> dilantik pada 24 September lalu yaitu Misriyani dari partai Gerindra dan Novianus dari partai PDI Perjuagan, berdasarkan surat keputu san KPU RI dan PKPU terkait dua calon anggota legislative tersebut dilakukan pergantian, untuk misriyani calon penggantinya adalah Adam Muhammad, sedangkan Novianus YL Patanduk digantikan oleh Risfyanti Muin keduanya merupakan peraih suara terbanyak ke dua di partai masing-masing."[37]

Proses pergantian caleg yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 246, tentang pergantian calon anggota legislatif terpilih yang teridiri empat kondisi yaitu: Pertama, apa bila yang bersangkutan meninggal duni. Kedua, mengundurkan diri. Ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota legislatif, dan keempat terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Salah satu mekanisme atau syarat untuk dilakukan pelantikan sebagai anggota DPR/DPRD adalah merupakan anggota partai politik, kondisi yang dialami Novianus tidak memungkinkan untuk dilakukan pelantikan karena sudah tidak masuk dalam anggota partai setelah dilakukan pemecatan oleh internal partai PDI Perjuangan, dan calon anggota DPR/DPRD harus diusulkan oleh partai politik. Upaya perlawanan pun dilakukan oleh simpatisan Novianus untuk mendesak DPP Partai PDI Perjuangan untuk mengembalikan keanggotaan calon legislative yang

[37] ...hir, Wawancara dilakukan Dikantor KPU Sulawesi Selatan, Pada tanggal 25 Mei 2020

Optimization Software:
www.balesio.com

didukungnya termasuk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PDI Perjuangan, Hal ini diungkapkan Martinus salah satu simpatisan Novianus YL Patanduk, berikut hasil wawancara penulis dengan informan:

> "kami dari simpatisan Novianus YL Patanduk merasa kecewa atas putusan partai PDI Perjuangan dengan melakukan pemecatan terhadap calon kami, sama saja partai tidak menghargai hasil demokrasi. Jangan karena ada keterlambatan pembayaran uang saksi lalu calon pilihan rakyat digagalkan dilantik, kami melakukan aksi protes sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap partai."[38]

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat ketidak percayaan masyarakat terhadap partai politik yang semenah-menah mengambil Langkah sampai melakukan pemecatan terhadap kadernya sendiri, meski pada dasarnya kader partai sudah berjuang untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Akan tetapi Langkah tegas yang dilakukan oleh partai sampai pada pencopotan keanggotaan.

5.1.3 Pola Komunikasi

Salah satu fungsi partai adalah sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi suatu jabatan politik. Pada pemilihan legislatif tahun 2019 partai PDI Perjuangan membuka pendaftaran untuk bakal calon anggota legislatif untuk daerah pemilihan (dapil) 2 Sulawesi Selatan dengan mengacu pada Peraturan KPU (PKPU). Aturan tersebut

Optimization Software:
www.balesio.com

terkait tahapan pendaftaran, pengisian silon, hingga syarat pencalonan ini terdapat dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Partai PDI Perjuangan mendaftarkan calon anggota legislatif 2019 untuk daerah pemilihan (dapil) 2 Sulawesi Selatan sebanyak 6 orang, yaitu: Dr. H. Mawang Batara Soli, S. Hut., M.Si, Fitzgerrald Lintin, Risfayanti Muin , S,S, Syamsuddin, S.E, Novianus YL Patanduk. Ika Retno Andini Kahar. Ke enam calon ini selain bersaing diekternal partai juga bersaing pada internal partai untuk mendapatkan perolehan suara tertinggi di Partai PDI Perjuangan, karena suara tertinggi memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan 1 kursi.

Persaingan di internal partai, partai politik sebagai Lembaga yang menaungi seluruh kader yang ada dibawahnya, termasuk melakukan pendampingan caleg pada saat melakukan sosialisasi, segala bentuk aktivitas caleg harus ada control terhadap partai. Namun hal ini tidak terjadi pada calon legislatif Novianus YL Patanduk, yang melakukan aktivitas kampanye diluar kendali partai politik. Hal ini diungkapkan oleh Sunardi Junaid Ketua Pemenang DPP Partai PDI Perjuangan berikut kutipan wawancara penulis dengan informan:

Optimization Software:
www.balesio.com

Mulai ditetapkannya sebagai calon anggota legislatif dari partai DI Perjuangan seluruh kader partai harus melakukan koordinasi engan pengurus partai, baik dalam proses berkampanye harus tap satu garis komando, begitupun proses pengawalan suara calon

legislatif itu merupakan tanggung jawab partai.maka dari itu kenapa seluruh calon legislative kita minta dana gotong royong untuk mendanai kegiatan seperti ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat bahwa hubungan kader dengan Lembaga harus sejalan tetap dalam control partai, segala aktivitas yang dilakukan calon legislatif harus dalam pengawalan partai, karena seorang kader idealnya harus menjaga nama baik partai. Karena pada dasarnya dalam suatu pemilu Politik memang saling mencari dukungan untuk meraih kemenangan. Hal yang membedakannya mana dan siapa yang bermain politik secara sportif dan elegan sesuai aturan, etika, dan koridor yang disediakan oleh demokrasi dan sistem politik yang berlaku serta mana yang menyalahinya.maka dari itu Ketika kader partai menyalahi aturan partai maka bukan hanya nama seorang calon yang menjadi rusak melainkan nama baik partai. Hal ini lah yang ditakutkan pengurus partai Ketika seorang kader diluar kendali partai.hal ini diakui sendiri oleh Novianus YL Patanduk terkait melakukan pergerakan diluar kendali partai, berikut kutipan wawancara penulis dengan Informan:

> “pada saat saya melakukan kampanye, saya melakukannya dengan Door to door, tanpa ada bantuan dari partai, jadi perolehan suara yang saya dapatkan murni karena hasil kerja keras saya. Pada saat hasil hitung cepat pun saya tidak mendapatkaan informasi dari partai melainkan saya dapat informasi dari koran kalua salah terpilih dengan mendapatkan kursi ke enam dari sisah kursi yang terbagi”.[39]

Optimization Software:
www.balesio.com

s YL Patanduk

Hasil perolehahan suara yang didapatkan setiap kader pada saat pemilihan legislatif merupakan hasil kerja keras kader dan partai untuk menggalang dukungan dari masyarakat, akan tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa, dalam sebuah organisasi kepartaian hubungan kader dan Lembaga yang manunginya merupakan sebuah sistem yang utuh, maka dari itu partai politik harus betul-betul menjalankan fungsinya sebagai partai politik dengan membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

5.2 Implikasi Teori

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka penelitian dalam menganalisis permasalahan yang ada yaitu pemecatan calon legislative terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD Partai PDI Perjuangan dengan teori kelembagaan baru (*new institusionalism*) oleh Rod Rhodes Hall dan Taylor, Pemahaman tentang partai politik Zarkasih Nur, Pelembagaan Partai Politik oleh Vicky Randall dan Lats Svasand, Teori asional oleh Coleman.

Optimization Software:
www.balesio.com

Berangkat dari hasil temuan penelitian dikaitkan dengan teori dan konsep, pertama pendekatan kelembagaan baru menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar dampak kelembagaan terhadap institusi akan tetapai bagaimana hubungan interaksi antar individu dengan Lembaga. Artinya bahwa, permasalahan yang terjadi yang melibatkan antara Novianus YL Patanduk dengan Risfayanti Muin juga melibatkan Partai PDI Perjuangan sebagai Lembaga yang menaunginya. Ketika terjadi permasalahan di iternal partai, maka Tindakan yang harus dilakukan partai politik menentukan arah Tindakan atau keputusan yang diambil.

Pendekatan kelembagaan baru yang dikemukakan Hall dan Taylor melihat dalam suatu kelembagaan dalam 3 kelompok pendekatan, pertama Institusonalisme historis, kedua institusinalisme pilihan rasinonal, dan yang ketiga institusionalisme sosiologis. Dalam pendekatan kelembagaan historis, melihat bahwa kelompok intitusional historis menerima anggapan bahwa konflik itu diantara kelompok yang saling bersaing untuk sumber daya yang langka, munculnya gugatan yang dilakukan Risfayanti Muin terhadap Novianus YL Patanduk mengisyaratkan adanya persaingan keduanya untuk memperebutkan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dikabulkannya gugatan Risfayanti Muin oleh mahkamah partai PDI Perjuangan adanya keistimewaan kepentingan partai sehingga melakukan pemecatan terhadap caleg terpilih Novianus YL Patanduk.

Optimization Software:
www.balesio.com

edua perpesktif kelembagaan Sosiologis melihat bahwa organisasi
bil seperangkat bentuk, prosedur atau symbol kelembagaan

tertentu, salah satu aturan partai PDI Perjuangan menjelaskan terkait kewajiban setiap anggota partai yang mencalonkan diri pada pemilihan legislatif untuk membayarkan sejumlah uang gotong royong, diwajibkan untuk membayarkan sejumlah uang yang ditetapkan dalam angaran dasar rumah tangga partai mengisyaratkan partai PDI Perjungan salah satu partai yang melakukan penolakan terhadap wacana pembiayaan uang saksi dibiayai oleh APBN , penolakan tersebut sebagai bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat kecil artinya bahwa dana tersebut sebaiknya diperuntuhkan untuk masyarakat.

Ketiga Perspektif Kelembagaan pilihan rasional, institusi pilihan rasional melihat proses intitusionalsisi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan Bersama melalui pertimbangan-pertimbangan untung rugi, mekanisme dalam penyelesaikan sengketa yang terjadi di internal partai PDIP Perjuangan dengan dilakukan mediasi antara Novianus YL Patanduk deng Risfayanti Muin, namun keputusan partai memutuskan untuk melakukan pemecatan terhadap kader terpilih dengan memilih Risfayanti Muin sebagai kader pengganti, karena melihat posisi tawar dan dianggap memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Lembaga.

Partai PDI Perjuangan sebagai Lembaga yang menaungi kedua kader yang bersengketa terkait hasil pemilu di daerah pemilihan (dapil) 2 Sulawesi Selatan perlu pertimbangan yang matang dan rasional emutuskan hasil sengketa di internal partai. Hal ini sejalan dengan ng dikemukakan oleh coulmane tampak jelas dalam gagasan

Optimization Software:
www.balesio.com

dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Dalam menentukan suatu pilihan partai politik akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian atas pilihan yang dipilihnya, termasuk dengan memilih Risfayanti Muin sebagai caleg terpilih, dan menentukan anggota legislatifnya menempati tiap komisi berdasarkan rapat pleno partai.

Pilihan rasional partai PDI Perjuangan dengan memilih Risfayanti Muin menggantikan Novianus YL Patanduk sebagai kader terpilih anggota legislatif tahun 2019, yang menjadi tindakan rasional partai adalah Risfayanti merupakan kader partai PDIP yang juga LO sedangkan Novianus jika berpacu dalam aturan ideal partai, belum dapat dikatakan sebagai kader partai karena belum mencukupi masa keanggotaannya selama 5 tahun (belum memenuhi syarat menjadi kader partai. kedua serta dinilai mampu menjalankan kepentingan partai yang disepakati bersama dalam internal partai PDIP.

Pilihan partai terhadap Risfayanti bukan semata-mata dipersiapkan untuk menduduki jabatan politis, secara kelembagaan PDI Perjuangan memberikan perlakuan yang sama terhadap kader partainya, akan tetapi dalam kondisi yang memungkinkan dan membuka peluang Risfayanti untuk an gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan Novianus YL k, sehingga gugatan yang dilayangkan diterima oleh mahkamah arena secara perolehan suara yang hanya selisih 48 suara

Optimization Software:
www.balesio.com

membuka peluang Risfayanti untuk duduk menggantikan Novianus YL Patanduk sebagai calon terpilih pada pemilihan angota legislatif tahun 2019 ,dan memang benar bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Novianus YL Patanduk adalah tidak berpartisipasi memabayar uang gotong royong partai.

Secara pelembagaan partai politik kader yang tergabung dalam sebuah institusi partai menurut Vicky Randal dan Lars Svasad melibatkan empat Variabel penting, yaitu: 'systemness (kesistemannya), decisional autonomy (putusan otonomi). value Infusion (nilai pemasukan), dan reificatlon, Systemness (kesisteman reifikasi).

Partai politik sebagai sebuah sistem, otonom, Infusion, dan reifikasi organisasi politik menjadi sebuah sistem yang utuh, mulai dari kader yang ada di DPD tingkat I, DPD tingkat II, sampai pada DPP tingkat pusat, jalur koordinasi dalam sebuah sistem kepartaian harus satu kesatuan untuk mejalankan tujuan partai politik dalam hal ini, Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara; dan Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. otonomi dalam tubuh partai merupakan sebuah keputusan ang bersifat otonom, artinya bahwa, segala kebijakan, perturan, an oleh pusat, termasuk dalam penyusunan anggaran dasar rumah partai (adrt) semua kader harus patuh terhadap aturan yang sudah

Optimization Software:
www.balesio.com

ditetapkan dan menjadi kewajiban setiap anggota partai baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Merujuk pada pengelolaan lnfrastruktur parpol dan dinamika lnternalnya: decisional autonomy, terkait dengan hubungan parpol dan lingkungan eksternalnya, khususnya menyangkut otonomi politik dan finansial, keterkaitannya dengan organisasi massa. dan kemampuan parpol untuk otonom dari permainan politik ditingkat nasional dan lokal; value Infusion, mirip dengan pemahaman di atas, terkait dengan dimensi attitudinal (nllai-nilal bersikap) pelembagaan parpol dimana nilai-nilai ldeologis yang dapat menarik dan melekat pada para anggota atau pendukung menjadi perhatian utama: dan terakhir, reincation terkait dengan kemampuan parpol untuk menanamkan suatu citra atau brand name (merek) tertentu dibenak para pemilih.' Jlka suatu parpol bisa mengelola keempat varabel tersebut dengan baik. maka dapat dikatakan parpol tersebut mengalami pelembagaan parpol yang optimal. dengan hasilnya tentu adanya stabiliitas organisasi. Efektitivitas peran dan posisi politiknya. menguatnya basis konstitusi dan penerimaan pemilih serta adanya dinamika intenal yang mendetong solidaritas parpol.

Salah satu tujuan partai politik menurut Zarkasih Nur adalah dengan melakukan sistem rekrutmen partai politik, dengan melakukan sistem pengkaderan dengan seluruh anggota partai, sehingga ideologi dan as seluruh anggota benar benar tertanam dalam benak setiap Sehingga hubungan secara kelembangaan antara partai politik

Optimization Software:
www.balesio.com

dengan kader terjalin komunikasi, karena pada dasarnya setiap kader dalam melaksakan suatu kegiatan politik, bukan hanya melibatkan dirinya saja akan tetapi ada isntitusi partai yang melekat pada dirinya, sehingga secara Tindakan akan mempengaruhi citra partai.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemecatan kader terpilih Partai PDI Perjuangan diakaibatkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Pemecatan anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh partai PDIP Novianus Y.L Patanduk, S.E terlambat membayar dana gotong royong saksi dalam pemilu serentak 2019.
2. Novianus YL Patanduk dituding melakukan permain perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) 2 Sulsel pada pemilihan legislatif tahun 20193
3. Tidak Berjalannya komunikasi antar kader partai dengan pengurus partai.

Uang gotong royong merupakan suatu hal yang wajib sebagai syarat untuk mencalonkan sebagai calon anggota legislatif Partai PDI Perjuangan, dana gotong royong digunakan pembiayaan dana saksi untuk mengawal perolehan suara partai mulai dari pemungutan suara sampai pada penetapan calon legislatif terpilih. Pemecatan Novianus YL Patanduk sebagai bentuk ketidak patutan terhadap aturan partai yang sudah an dan disekapakati di Musyawarah Nasional Partai PDI gan.

Optimization Software:
www.balesio.com

5.2 Saran

Adapun saran penulis dapat berikan berdasarkan dari data informasi dan analisis mendalam selama penulis melakukan penelitian terkait:

Sebagai anggota kader yang tergabung dalam organisasi partai politik seharusnya setiap kader mengetahui aturan internal partai politik, dan setiap kader harus patuh terhadap aturan yang sudah menjadi ketentuan partai. Serta partai politik seharusnya melakukan pemecatan sebelum kader ditetapkan sebagai kader terpilih, bukan dengan sebalinya dipecat setelah dinyatakan terpilih.

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR PUSTAKA

Assiddiq, Temli. 2014. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indoensia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Astris. Susanto. 2006. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial.*: Bina Cipta. Bandung.

Asy'ari, Hasyim. 2014. *Konsolidasi Demokrasi (Pergulatan Politik Pemilu Indonesia)*. Thafa Media: Yogyakarta.

Bagus Ida Wirawan. 2014. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, Fakta social, definisi social, dan perilaku social. Prenadamedia Group. Jakarta.

Blau, Peter M. dan Marshal W. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern.* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, Robert A, 1982. *Analisa Politik Modern* . Jakarta: Gramedia.

Efriza. 2012*. Politikal Explore (Sebuah Kajian Ilmu Politik.: Sebuah Kajian Ilmu Politik.* Bandung: Afabeta.

Elly M dan Usman Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi Politik. PRENADAMEDIA. Jakarta..

Genovese, Eugene D. 1995. Legal Studies as Cultural Studies a Reader in

st modern Critical Theory. State University of Newyork Press.

Ritzer. Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern.*

karta: Prenada Media.

Optimization Software:
www.balesio.com

Herman, Arsandi.2015. Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh sosiologi Dari Klasik Sampai Modern. Ircisad: Jakarta.

Hidayat, Syarif. 2016. *Dinamika Sistem politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik di tengah pergeseran kepentingan massa.* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Heywood, Andrew. 2013. Politik. Edisi keempat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Justicia, Vita. Undang-Undang Pemilu 2019. Huta Media. Yogyakarta.

K. Yin, Robert. 2015. Studi Kasus, Desain & Metode. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta

M. Alfan Alfian, 2008. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

M. Gaffar. 2012. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkama Konstitusi*. Kanpres: Jakarta.

Miriam Budiardjo. 2013. Dasar-dasar ilmu politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

M. Iqbal Hasan, 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. GHALIA INDONESIA. Bogor.

M. Setiadi. Elly. 2013. *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Tentang Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya):* Kencana. Jakarta.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pamungkas Sigit. 2011. Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia. Institute for Democracy and Welfarism. Yogyakarta.

Sadra, Amalia Luky. 2017. Partai Dan Sistem Kepartaian Era Demokrasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Saragih, Bintang. 1985. Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia. Gria Media Pratama: Jakarta.

Subakti, Ramlan. Didik Suprayanto. 2011. *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat*. Kemitraan: Jakarta.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tabolo, Muhadir. 2017. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tacobar, Ranjabar.2916. *Pengantar Ilmu Politik (Dari Ilmu Politik Sampai Politik Globalisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Ulber Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*, PT. Reflika Aditama. Bandung.

Winanrno Surakhnad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung: Tarsito, 1990).

Wirawan, IB. 2015. *Teori Teori Sosial Dalam 3 Pradigma*. Kencana: Jakarta.

Wulandari, Lia. Khairunnisa. 2013. Penerapan Arena Perebutan kursi DPRD. The Asia Fundation: Jakarta.

s, Priyohnadoko. 2017. DPT Dibalik Layar: KPU RI: Jakarta.

Optimization Software:
www.balesio.com

https://makassar.tribunnews.com/2019/09/22/dipecat-pdip-novianus-patanduk-tetap-ikut-gladi-pelantikan-anggota-dprd-sulsel

Optimization Software:
www.balesio.com

LAMPIRAN 1 ADRT PARTAI PDI PERJUANGAN TERKAIT

PEMECATAN

Bagian Keempat
Disiplin Partai

Pasal 21

(1) Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai.
(2) Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Bagian Kelima
Larangan Anggota

Pasal 22

Anggota Partai dilarang:

a. menjadi anggota organisasi politik lainnya;
b. melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai;
c. melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;
d. mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;
e. membocorkan rahasia Partai;
f. menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra Partai;
g. melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Partai; dan
h. melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-Peraturan Partai.

Bagian Keenam
Sanksi Anggota Partai

Pasal 23

(1) Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi.
(2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa:
    a. peringatan;
    b. pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
    c. pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan

Optimization Software:
www.balesio.com

d. pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan sanksi kepada Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Bagian Ketujuh
Pemecatan atau Pemberhentian Anggota Partai

Pasal 24

(1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.

(2) Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat:
   a. mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau
   b. mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 25

Bagi Anggota Partai yang ditugaskan oleh Partai di jabatan politik dan jabatan publik di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang dikenakan sanksi pemberhentian/pemecatan dari keanggotaan Partai, maka Partai secara tertulis memberitahukan kepada lembaga politik dan lembaga publik tempat bersangkutan ditugaskan.

Optimization Software:
www.balesio.com

LAMPIRAN II PEROLEHAN KURSI DPRD SULAWESI SELATAN PERIODE 2019-2024

REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK DI SETIAP DAERAH PEMILIHAN HASIL PEMILU 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK (PARTAI POLITIK + CALEG) DAN PEROLEHAN KURSI DI SETIAP DAERAH PEMILIHAN																						TOTAL SUARA SAH PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN KURSI
		SULSEL 1		SULSEL 2		SULSEL 3		SULSEL 4		SULSEL 5		SULSEL 6		SULSEL 7		SULSEL 8		SULSEL 9		SULSEL 10		SULSEL 11			
		SUARA SAH	JUMLAH KURSI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI		
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	24.160	1	4.543	0	50.992	1	43.247	1	42.984	1	44.383	1	15.899	0	40.881	1	29.222	1	1.864	0	38.827	1	334.792	8
2	PARTAI GERINDRA	48.169	1	37.981	1	68.170	1	62.974	1	49.825	1	58.114	1	45.894	1	34.365	1	58.997	1	27.829	1	57.935	1	548.033	11
3	PDI PERJUANGAN	28.831	1	21.998	1	27.174	0	24.632	0	15.098	0	48.554	1	37.231	1	27.594	1	39.897	1	33.481	1	53.216	1	357.704	8
4	PARTAI GOLKAR	41.511	1	45.295	1	49.718	1	43.678	1	52.786	1	96.549	2	95.147	1	70.877	1	58.542	1	45.287	1	88.278	2	683.444	13
5	PARTAI NASDEM	103.445	2	37.987	1	53.422	1	42.411	1	44.488	1	46.674	1	37.521	1	30.165	1	73.671	1	41.193	1	53.845	1	564.622	12
6	PARTAI GARUDA	2.501	0	1.791	0	5.602	0	3.134	0	2.865	0	12.555	0	1.247	0	2.356	0	2.903	0	532	0	699	0	36.285	0
7	PARTAI BERKARYA	8.473	0	13.398	0	24.573	0	10.523	0	10.290	0	14.722	0	28.195	0	13.462	0	6.914	0	14.022	0	13.325	0	157.895	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	25.181	1	27.807	1	54.585	1	22.235	0	33.252	1	52.202	1	34.416	1	25.073	0	37.088	1	285	0	62.166	1	374.290	8
9	PARTAI PERINDO	13.816	0	6.352	0	43.726	1	9.265	0	8.752	0	14.768	0	8.642	0	2.785	0	10.869	0	10.316	0	18.052	0	143.341	1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30.079	1	14.919	0	48.081	1	26.195	1	17.149	0	25.678	0	15.858	0	38.553	1	55.384	1	793	0	47.166	1	317.833	6
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	9.887	0	4.527	0	9.408	0	20.622	0	2.801	0	7.234	0	1.869	0	2.093	0	704	0	6.903	0	6.469	0	72.515	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	19.268	0	18.458	0	31.279	1	25.158	1	32.809	1	62.378	1	39.138	1	24.286	0	57.831	1	1.385	0	66.128	1	378.112	7
13	PARTAI HANURA	10.870	0	10.989	0	14.124	0	6.479	0	20.892	0	23.347	0	13.044	0	8.139	0	17.381	0	28.325	0	41.045	1	192.615	1
14	PARTAI DEMOKRAT	28.487	1	22.040	1	58.369	1	33.704	1	28.857	0	34.285	1	32.257	1	40.353	1	51.423	1	46.200	1	52.573	1	429.548	10
19	PARTAI BULAN BINTANG	2.296	0	9.373	0	7.274	0	3.771	0	8.087	0	6.588	0	5.994	0	2.530	0	25.049	0	165	0	24.056	0	93.181	0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	456	0	450	0	8.288	0	423	0	271	0	455	0	248	0	188	0	315	0	382	0	261	0	11.735	0
	TOTAL	397.428	9	277.864	6	554.781	9	378.449	7	368.266	6	548.490	9	412.396	7	361.300	7	522.170	9	256.962	5	617.839	11	4.695.945	85

Optimization Software:
www.balesio.com

LAMPIRAN III PEROLEHAN SUARA DAERAH PEMILHAN II SULAWESI SELATAN

Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi
Tahun 2019
Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B)

No.	Nama Partai	Bilangan Pembagi					Jumlah Kursi
			1		3		
		Suara Sah	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	
1	PKB	4.543	4.543		-	-	0
2	GERINDRA	37.961	37.961	3	-	-	1
3	PDI-P	21.996	21.996	6	-	-	1
4	GOLKAR	45.295	45.295	1	-	-	1
5	NASDEM	37.987	37.987	2	-	-	1
6	GARUDA	1.791	1.791		-	-	0
7	BERKARYA	13.396	13.396		-	-	0
8	PKS	27.807	27.807	4	-	-	1
9	PERINDO	6.352	6.352		-	-	0
10	PPP	14.919	14.919		-	-	0
11	PSI	4.527	4.527		-	-	0
12	PAN	18.458	18.458		-	-	0
13	HANURA	10.969	10.969		-	-	0
14	DEMOKRAT	22.040	22.040	5	-	-	1
19	PBB	9.373	9.373		-	-	0
20	PKPI	450	450		-	-	0
Alokasi Kursi				6			6

Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Optimization Software:
www.balesio.com

LAMPIRAN IV PERLOHAN SUARA PARTAI PDI PERJUANGAN
DAERAH PEMILIHAN 2 SULAWESI SELATAN

Perolehan Suara PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B)

No	Nama Caleg	Jumlah Suara
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.354
1.	Dr. H.A Mawang Batara Soli,S.Hut, M.Si	3.595
2.	Fitzgerald Lintin	1.667
3.	Risfayanti Muin, S.S	4.257
4.	Syamsuddin, SE	3.504
5.	**Novianus YL Patanduk, SE**	**4.305**
6.	Ika Retno Andini Kahar	314
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg		**21.996**

Sumber dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Optimization Software:
www.balesio.com

LAMPIRAN V BERITA ACARA KLARIFIKASI PENGURUS DPD PDI PERJUANGAN SULAWESI SELATAN

BERITA ACARA KLARIFIKASI
NOMOR : 2357 / PL.01-BA/73/Prov/IX/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 10.25 WITA , saya

----------: M. ASRAM JAYA :----------

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan bertindak atas nama lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama:

----------: HUSAIN DJUNAID, S.H., M.H. :----------

Dilahirkan di Soppeng tanggal Tujuh Belas bulan Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu (umur 48 Tahun), pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Makassar

Dia (Husain Djunaid, S.H., M.H.) didengar keterangannya sebagai Kabid Pemenangan Pemilu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Selatan.

Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas?----------
   ----------01. Ya, Sehat.----------
2. Apakah pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait Surat Keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan PDI Perjuangan atas nama Saudara Novianus Y.L. Patanduk?----------
   ----------02. Ya, Bersedia.----------

Optimization Software:
www.balesio.com

3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan!----------

----------03. Iya, mengerti. Untuk menjelaskan terkait Surat Keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan PDI Perjuangan atas nama Saudara Novianus Y.L. Patanduk ----------

Pertanyaan Isi

4. Apakah Saudara mengenal Novianus Y.L. Patanduk?

----------04. Iya, Kenal. Beliau adalah Caleg dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan---

5. Coba Saudara menjelaskan kronologis kejadian yang Saudara ketahui terkait pemberhentian Novianus calon terpilih DPRD Prov. Sulsel dari PDI Perjuangan?

----------05. Terkait dengan surat DPP PDI perjuangan Nomor 82 perihal pemberitahuan pemecatan calon terpilih anggota DPRD Sulsel dari keanggotaan PDI Perjuangan An. Novianus Y.L. Patanduk Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2. Bahwa surat ini benar adanya cap dan ditandatangani Ketua dan Sekjen Pak Hasto. Tentu surat ini tidak serta merta keluar tetapi melalui proses internal partai.

Perlu kami sampaikan bapak komisioner bahwa awal mula masalah ini terkait dengan proses internal PDI Perjuangan. Dimana PDI Perjuangan dalam menghadapi Pemilu seluruh kader caleg diminta untuk bergotong royong dan ini sudah menjadi keputusan partai dan semua caleg patuh untuk itu, atas dasar laporan dari sekretariat, ada caleg yang tidak melaksanakan kewajiban. Dari DPD PDI Perjuangan kami menyurati seluruh caleg dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namanya Dana Gotong Royong untuk partisipasi dalam hal membiayai saksi kita.

Surat pertama kami itu tanggal 19 Januari 2019 ditujukan kepada calon anggota DPRD Provinsi dari PDI Perjuangan perihal penyampaian bahwa berdasarkan hasil keputusan Rakor DPD dan hasil pleno DPD. DPD partai akan segera merekrut saksi pileg yang dibiayai secara gotong royong oleh seluruh anggota DPRD Provinsi. Lalu DPD lagi bersurat penegasan tanggal 15 Februari 2019 mengingatkan hasil Rakornas PDIP dan berdasarkan hasil Rakorda serta memperhatikan surat DPD nomor 1234, bahwa kita mengingatkan kepada semua calon anggota DPRD Provinsi, setelah itu tanggal 23 Maret 2019 kami surati lagi untuk penegasan tentang dana saksi ditujukan kepada anggota DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan laporan sekretariat ternyata saudara Novianus Y.L. Patanduk telah disurati sebanyak tiga kali bahkan sudah dihubungi melalui telepon dan dia berjanji untuk membayar dana saksi tetapi setelah itu Sdr. Novianus dihubungi kembali namun panggilan telepon tidak direspon. Kami sudah menghubungi Sdr. Novianus melalui staf kami baik melalui pesan WA (Whatsapp) maupun melalui telepon untuk kami ingatkan,

Optimization Software:
www.balesio.com

sampai proses Pemilu selesai kemudian kita meminta kepada Sdr. Novianus Y.L. Patanduk untuk klarifikasi. Sekitar bulan Mei keluarganya datang untuk membayar dana saksi, tapi Pemilu sudah berakhir dan distribusi dana saksi sudah tersalurkan.

Pada tanggal 13 Mei 2019 kita melakukan pemanggilan kepada Sdr. Novianus Y.L. Patanduk terpanggil untuk klarifikasi. Bertempat di Sekretariat PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Surat terlampir juga kami sampaikan.

6. Tanggal 13 Mei 2019 Sdr. Novianus Y.L. Patanduk dipanggil oleh pengurus DPD PDI Perjuangan, apakah kami bisa tau substansi dari hasil klrafikasi tersebut?

----------06. Pemanggilan kemarin ditanya kenapa tidak membayar kewajiban dana saksi, tetapi beliau menyampaikan bahwa pada waktu itu dananya kurang, Seperti itu substansi klarifikasi Sdr. Novianus Y.L. Patanduk.

7. Setelah klarifikasi apakah hasilnya ditindak lanjuti oleh DPD PDI Perjuangan?

----------07. Iya ditindak lanjuti oleh DPD PDI Perjuangan, selain ini ada masalah terkait dengan hasil Pemilu kemarin.

8. Di dalam Surat Keputusan ada dua poin yang kami lihat yaitu soal perolehan suara diperoleh secara curang dan juga tentang dana saksi. Namun Kami tidak pernah mendapatkan penyampaian secara berjenjang perselisihan suara yang dimaksud sehingga ada perbedaan. Apakah bisa dijelaskan pada bagian mana yang menguntungkan Sdr. Novianus Y.L. Patanduk dan yang merugikan Sdr. Risfayanti?

----------08. Internal kita ada aturan yang mengatur, ada surat DPP PDI Perjuangan Nomor 5193 dutujukan kepada DPD PDI Perjuangan lalu disampaikan berjenjang ke calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa dalam pelaksanakan Pemilu Legislatif 2019 akan banyak terjadi dugaan pelanggaran dan sengketa hasil Pemilu yang diselesaikan oleh internal partai untuk membantu menyelesaikan sengketa Pemilu. Diinstruksikan juga untuk jajaran PDI Perjuangan seluruh Indonesia apabila ada dugaan pelanggaran Sengketa Legislatif secara Internal maka Calon Legislatif tidak diperbolehkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada Eksternal Partai, apabila ada Caleg yang melaporkannya kepada Eksternal Partai, maka DPP Partai akan mempertimbangkan kembali atas pencalegannya. Pengajuan laporan dugaan pelanggaran sengketa Pemilu Legislatif 2019 Internal Partai berdasarkan peraturan partai.

9. Kami telah menelusuri data yang mengalami pengurangan dan penambahan yang dimaksud oleh calon, terlihat pada tabel pengurangan suara, tabel penambahan suara di Kecamatan Biringkanaya, Panakukang, Tamalanrea dan Manggala. Apakah bisa diperlihatkan data yang dimiliki PDI Perjuangan?

---------09. Saya tidak masuk ke dalam persoalan itu, itu menjadi wilayah ahkamah Partai. Bukan kapasitas saya untuk menjawab hal itu, karena ini

Optimization Software:
www.balesio.com

sudah diselesaikan di internal Partai dan Surat Keputusan juga sudah keluar.

Mereka itu sudah dipanggil dan itu sudah diklarifikasi oleh Mahkamah Partai. Bahkan keduanya sudah dipertemukan dan dikonfrontir oleh Mahkamah Partai.

Ini ada surat DPP PDI Perjuangan sehubungan dengan Surat Keputusan DPP tentang penyelesaian perselisihan Partai akan memeriksa sDR. Risfayanti sebagai Pelapor dan Sdr. Novianus Y.L. Patanduk sebagai terlapor. Mereka hadir pada tanggal 27 Juni 2019 di Mahkamah Partai, kemudian pemanggilan sidang itu dilakukan di Mahkamah Partai.

10. Setelah melaporkan ke Mahkamah Partai, apakah Sdr. Risfayanti menyampaikan ke DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan?

----------010. Iya, menyampaikan. Dokumen tersebut sudah disampaikan ke DPP langsung oleh Sdr. Risfayanti.

11. Apakah Sdr. Novianus Y.L. Patanduk mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan Partai?

----------011. Secara langsung maupun melalui surat tidak disampaikan ke DPD Partai.

12. Kami menerima Surat secara resmi tembusan dari Sdr. Novianus Y.L. Patanduk telah mengajukan pembahasan atas kasusnya ke DPP PDI Perjuangan?

----------012. Kami belum mendapatkan dan melihat suratnya, karena Sdr. Novianus Y.L. Patanduk langsung melaporkan ke DPP PDI Perjuangan. Sebelum surat itu keluar, sudah dilakukan mediasi kedua belah pihak namun menemui jalan buntu, sehingga dilakukan mediasi lagi di DPP PDI Perjuangan.

13. Kapan persoalan ini muncul?

----------013. Ini berawal dari masalah dana gotong royong atau dana saksi yang tidak dibayar lalu persoalan perolehan suara muncul setelah Pemilu.

14. Apakah Saudara dapat memberikan salinan dokumen pendukung yang disebutkan dalam klarifikasi ini?

----------014. Iya, saya bersedia.

15. Apakah ada tembusan ke KPU Provinsi tentang Keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan PDI Perjuangan Sdr. Novianus Y.L. Patanduk?

----------015. Iya, ada.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pertanyaan Penutup

17. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum?----------

----------017. Ya, Benar.----------

18. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?----------

----------018. Cukup.----------

19. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ?----------

----------019. Ya, Bersedia.----------

20. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?.

----------020. Tidak.----------

METERAI TEMPEL 27C4AAFF892531521 6000 ENAM RIBU RUPIAH

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(HUSAIN DJUNAID, S.H., M.H.)

---------- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar- benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar, pada Pukul 12.00 WITA, hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas----------

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(M. ASRAM JAYA)

Optimization Software:
www.balesio.com

DOKUMENTASI PENELITIAN

WAWANCARA OLEH: RISFAYANTI MUIN

KADER TERPILIH DAPIL 2 SULSEL PDI PERJUANGAN

Optimization Software:
www.balesio.com

WAWANCARA OLEH NOVIANUS YL PATANDUK

KADER PARTAI PDI PERJUANGAN

Optimization Software:
www.balesio.com

WAWANCARA DENGAN HUSAIN JUNAID

KETUA BADAN PEMENANGAN PEMILU DPD PARTAI PDI PERJUANGAN SULSEL

PDF
Optimization Software:
www.balesio.com

KUNJUNGAN KE KANTOR DPD PARTAI PDI PERJUANGAN

Optimization Software:
www.balesio.com